



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---

**DINAS CIPTA KARYA  
DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI  
TENGAH**

# LKJIP

2022

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33 Palu 94114 Telp/Fax (0451) 4015509 PALU – 94114  
Website : [www.cikasda.sultengprov.go.id](http://www.cikasda.sultengprov.go.id) Email : [cikasda@sultengprov.go.id](mailto:cikasda@sultengprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2022.

LKJiP Tahun 2022 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*) kepada pemberi amanah. LKJiP ini disusun berdasarkan dokumen Rencana Kinerja tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air tahun 2021 – 2026.

LKJiP tahun 2022 menyajikan semua capaian kinerja program (*performance results*) yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja (*performance plan*) *level output* maupun *outcome* kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Disamping Rencana Kinerja (Renja) setelah terbitnya DPA juga ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen seluruh unsur Pimpinan dan Staf Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dalam merealisasikan tanggungjawab kepada *stakeholder*. Target dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Penilaian kinerja atas LKJiP Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan terhadap indikator *output* dan *outcome* yang terdapat dalam kegiatan dan program yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022, dengan cara membandingkan antara target indikator dengan realisasinya.

Dalam tahun 2022, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah telah menjalankan seluruh program dan melaksanakan kegiatannya dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian kinerja *output* atas 8 (delapan) Program Teknis dan 1 (satu) Program Penunjang serta 34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan 130 (seratus tiga puluh) Sub Kegiatan telah mencapai realisasi fisik **82,55%** dan realisasi keuangan **79,99%** dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana lokasi Khusus (DAK) dan dana LOAN AIF No. 11DDKS1A dan LOAN ADB 1Z83YQPA Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP).

Hasil capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa Program strategis yang dituangkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 (empat belas) Indikator Program serta terdapat 1 (satu) indikator program tidak mencapai target yang ditetapkan.

Semoga Pencapaian Kinerja dan implikasinya memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air dalam melaksanakan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif dan bermanfaat kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Palu, Januari 2023

**Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Dr. ANDE RULY DJANGGOLA, SE., M.Si**

**Pembina Tingkat I**

**Nip. 19801216 200212 1 003**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Cascading Kinerja .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	19
1.3 Isu-Isu Strategis.....	22
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana.....	25
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 .....	27
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>33</b>
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	33
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	41
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	53
2.5 Perjanjian Kinerja 2022 .....	62
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>65</b>
3.1 Capaian Kinerja.....	65
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini .....	67
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	70
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	75
3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	76
3.1.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	79
3.2 Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran .....	84
3.3 Inovasi.....	95
3.4 Penghargaan .....	97
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN .....</b>	<b>100</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Cascading Kinerja**

Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebagai institusi yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam pembangunan dan pengembangan Cipta Karya dan Sumber Daya Air di Sulawesi Tengah melaksanakan seluruh aktivitasnya sesuai ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan Tahun 2022. Komitmen kinerja yang harus dicapai Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2022, Dinas Cipta karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 2 (dua) tujuan strategis, yang dibagi dalam 8 (delapan) Program Teknis dan 1 (satu) Program Penunjang. Seluruh Program diwujudkan ke dalam masing-masing kegiatan yang berjumlah 30 (Tiga puluh) kegiatan dan 91 (Sembilan puluh satu) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran yang dialokasikan dalam Belanja Langsung DPPA TA. 2022 sebesar 261.389.844.251,-

Hasil capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa Program strategis yang dituangkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 (empat belas) Indikator Program serta terdapat 1 (satu) indikator program tidak mencapai target yang ditetapkan.

Cascading Kinerja Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut :



# DINAS CIPTA KARYA & SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH

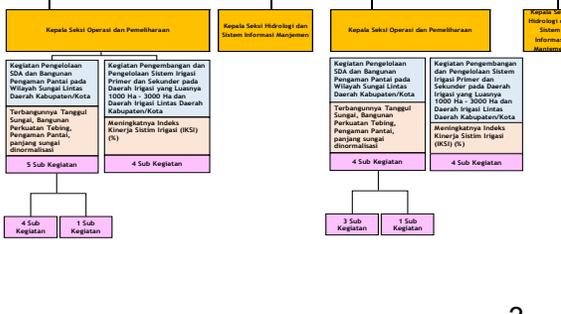
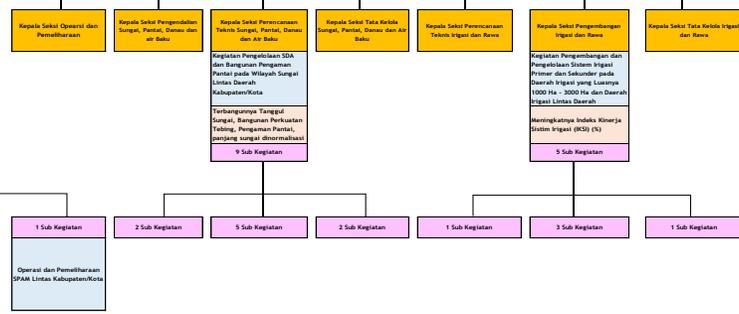
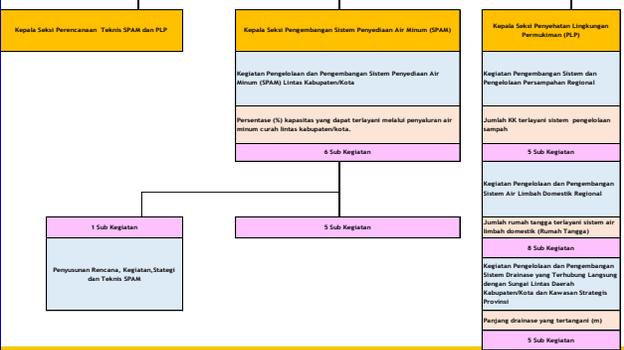
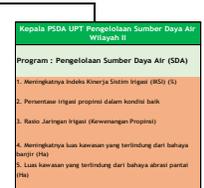
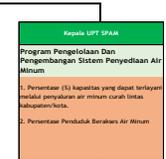
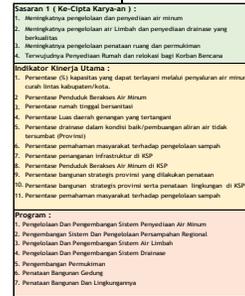
## CASCADING/ POHON KINERJA

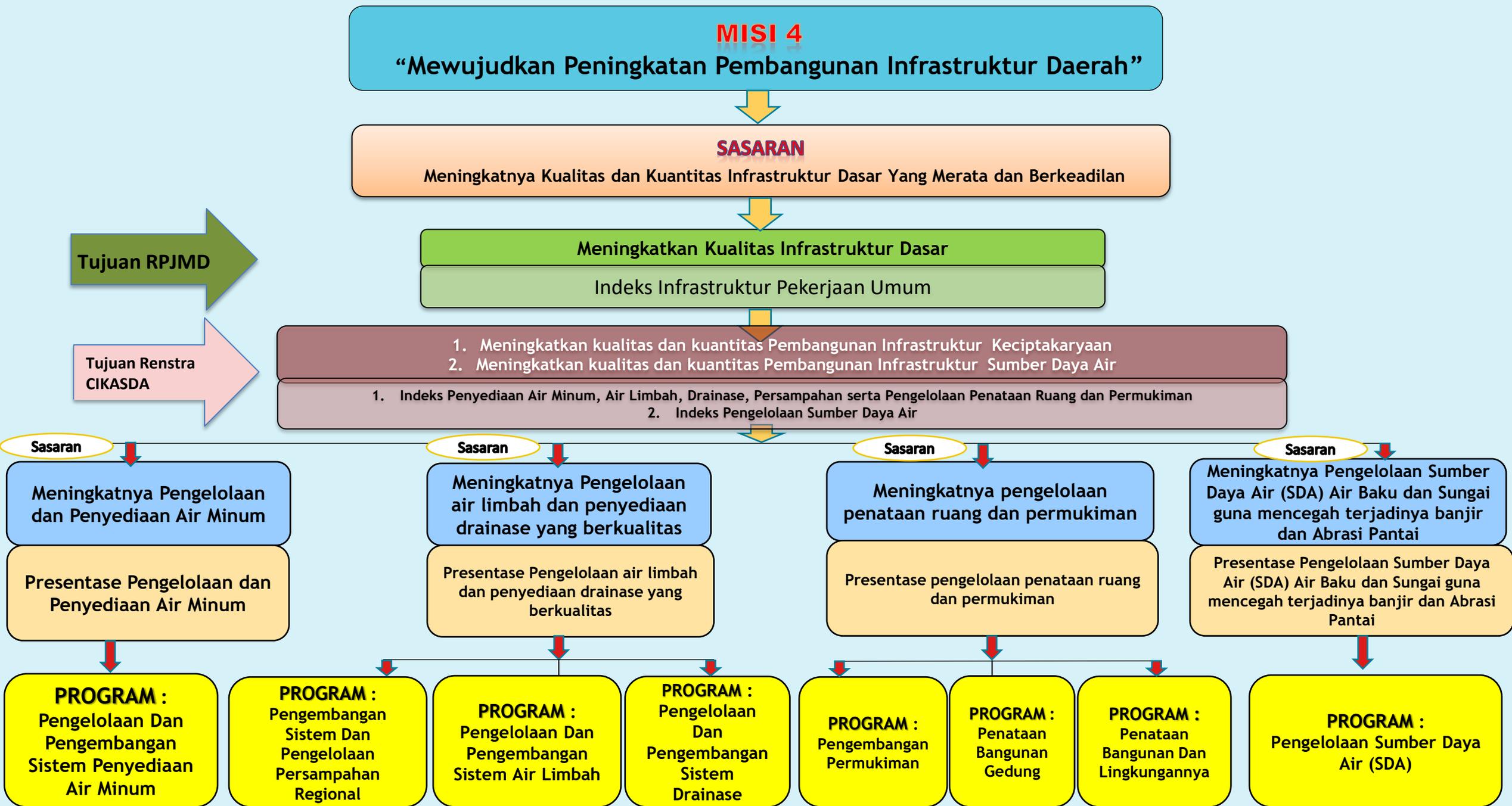
CIKASDA PROVINSI SULAWESI TENGAH





# POHON KARYA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021





## Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

URUSAN  
KECIPTAKARYAAN

- Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.
- Persentase Penduduk Berakses Air Minum

### Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah Kumulatif (Liter/detik) Kapasitas yang dapat terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota

#### 4 SUB KEGIATAN (BIDANG AMPL)

<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM</b>	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)
<b>Supervisi Pembangunan/Perbaikan/Perluasan/Perbaikan SPAM</b>	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional (Dokumen)
<b>Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan</b>	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)
<b>Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota</b>	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Ha)

#### 6 SUB KEGIATAN (UPT SPAM)

<b>Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan</b>	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional (SR)
<b>Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM (Kab/Kota)
<b>Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi</b>	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)
<b>Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota</b>	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara (unit)
<b>Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)
<b>Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Badan Usaha Pengelola SPAM yang dibentuk (Badan Usaha)

## Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah

### Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)

#### 5 SUB KEGIATAN (BIDANG AMPL)

<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun (Dokumen)
<b>Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Dokumen)
<b>Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi (Rumah Tangga)
<b>Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)
<b>Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan</b>	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Kelompok Masyarakat)

## Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional
- Presentase rumah tinggal bersanitasi

### Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Limbah Domestik (Unit)

#### 8 SUB KEGIATAN

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun (Dokumen)
Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Jumlah Unit Prasarana Cubluk yang Disediakan (Unit)
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Rumah Tangga)
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (Dokumen)
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik (Kelompok Masyarakat)
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik (orang)
Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara (unit)

## Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

- Persentase Luas daerah genangan yang tertangani
- Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi)

### Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi

Jumlah Sistem Drainase perkotaan yang disediakan, yang beroperasi dan terpelihara (Unit)

#### 5 SUB KEGIATAN

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)
Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan (orang)
Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (unit)
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)





## Program Pengembangan Permukiman

Persentase penanganan Infrastruktur di Kawasan Strategis Permukiman

### Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang dibangun dan dipelihara di kawasan Strategis Daerah Provinsi (Sistem Jaringan)

### 2 SUB KEGIATAN

<b>Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.</b>	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (sistem jaringan)
<b>Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara (sistem jaringan)

## Program Penataan Bangunan Gedung

Persentase Bangunan Strategis Provinsi yang dilakukan Penataan

### Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Renovasi Ubahsui (Unit)

### 3 SUB KEGIATAN

<b>Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Dokumen)
<b>Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui (Unit)
<b>Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi</b>	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)

## Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Persentase Bangunan Strategis Provinsi serta penataan lingkungan di KSP

### Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)

### 5 SUB KEGIATAN

<b>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)
<b>Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</b>	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)
<b>Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)
<b>Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota</b>	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota (Dokumen)
<b>Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan</b>	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Dokumen)

# Program Pengelolaan Sumber Daya Air



**Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi**  
**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir**  
**Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi**  
**Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi**

## Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Provinsi (HA)

## Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Presentase Panjang Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Kewenangan Provinsi dalam Kondisi baik

8 Sub Kegiatan (Bidang Sungai Pantai)	
<b>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai</b>	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai (Dokumen)
<b>Pembangunan Unit Air Baku</b>	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun (KM)
<b>Pembangunan Tanggul Sungai</b>	Panjang Tanggul sungai (meter)
<b>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</b>	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing (meter)
<b>Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya</b>	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (meter)
<b>Normalisasi/Restorasi Sungai</b>	Panjang sunga yang diNormalisasi/Restorasi (meter)
<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (lembaga)
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga)

3 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. I)	
<b>Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai</b>	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)
<b>Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya</b>	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter)
<b>Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen)

3 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. II)	
<b>Normalisasi/Restorasi Sungai</b>	Panjang sungai yang di Normalisasi/Restorasi (meter)
<b>Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai</b>	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (meter)
<b>Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya</b>	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara (meter)
<b>Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi (dokumen)

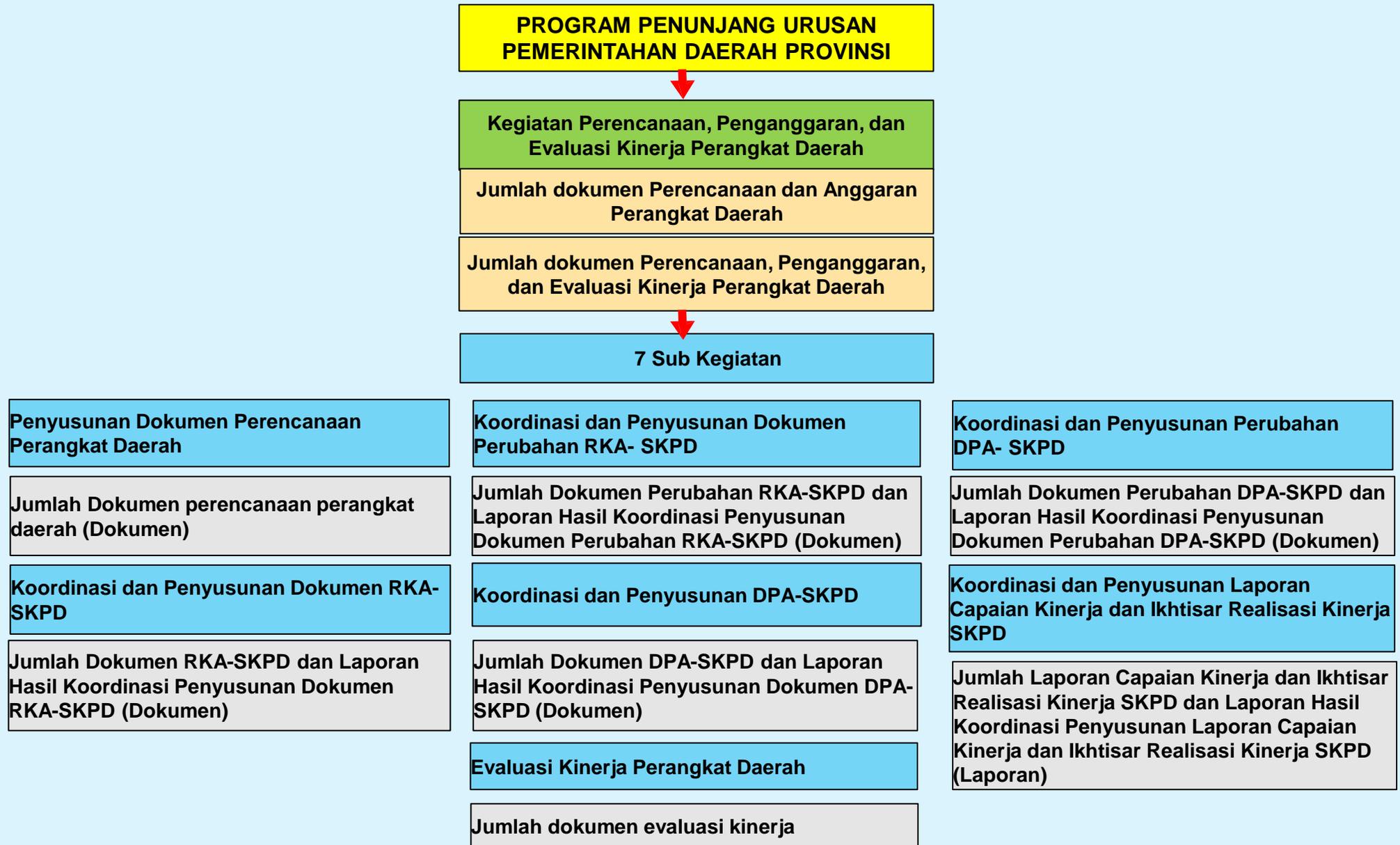
7 Sub Kegiatan (Bidang Irwa)	
<b>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</b>	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (dokumen)
<b>Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (meter)
<b>Pembangunan Bendung Irigasi</b>	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun (bendung)
<b>Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	Bertambahnya Luas Areal Layanan (Daerah Irigasi)
<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</b>	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (meter)
<b>Rehabilitasi Bendung Irigasi</b>	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (bendung)
<b>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	Terlatihnya Petugas/Staf Pengelola OP Irigasi dan P3A/GP3A/IP3A serta meningkatnya kapasitas kelembagaan Irigasi dan Rawa (kegiatan)

4 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. I)	
<b>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)
<b>Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi</b>	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)
<b>Operasional Unit Pengelola Irigasi</b>	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)
<b>Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi</b>	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)

4 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. II)	
<b>Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (meter)
<b>Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi</b>	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara (bendung)
<b>Operasional Unit Pengelola Irigasi</b>	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan (unit)
<b>Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi</b>	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air (DI)



# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR





# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan



2 Sub Kegiatan

**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/Bulan)

**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)

**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah



2 Sub Kegiatan

**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)

**Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)



# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR



**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (paket)

**Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)

**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)

**Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)

**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)



**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)

**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)

**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)

**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)

**Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**4 Sub Kegiatan**

**Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)

**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)

**Pengadaan Mebel**

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)

**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**3 Sub Kegiatan**

**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)

**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)

**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**5 Sub Kegiatan**

**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)

**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara

**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

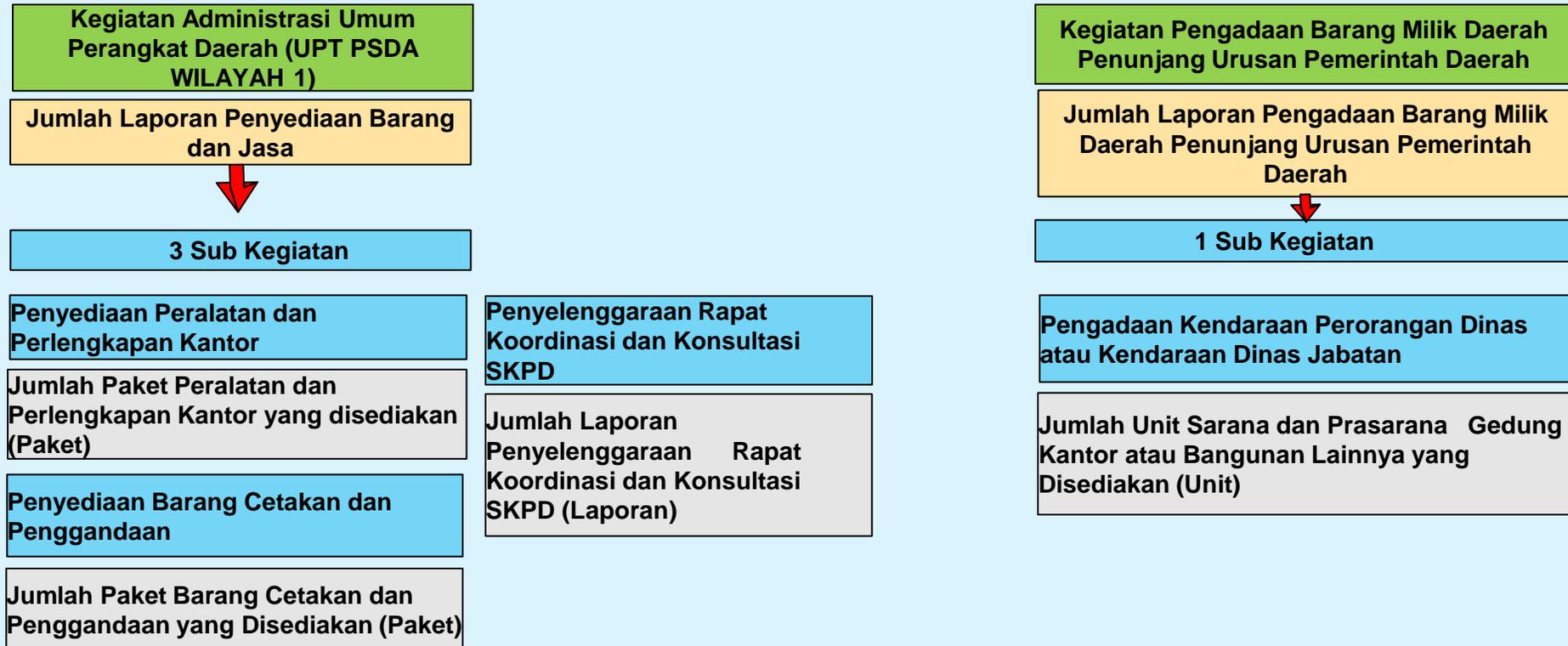
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

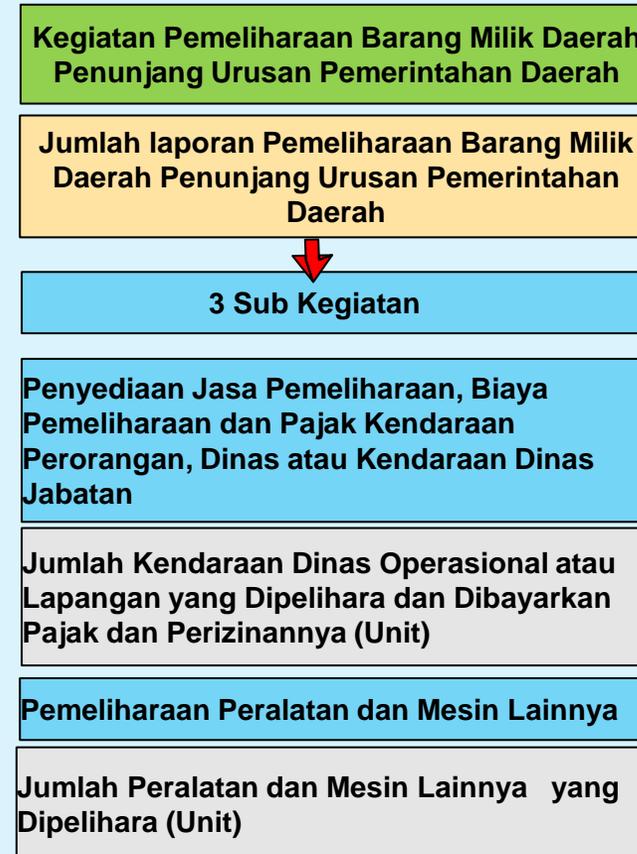
**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)





# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR





# CASCADING KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT PSDA WILAYAH 2)**

**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**



**5 Sub Kegiatan**

**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)**

**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

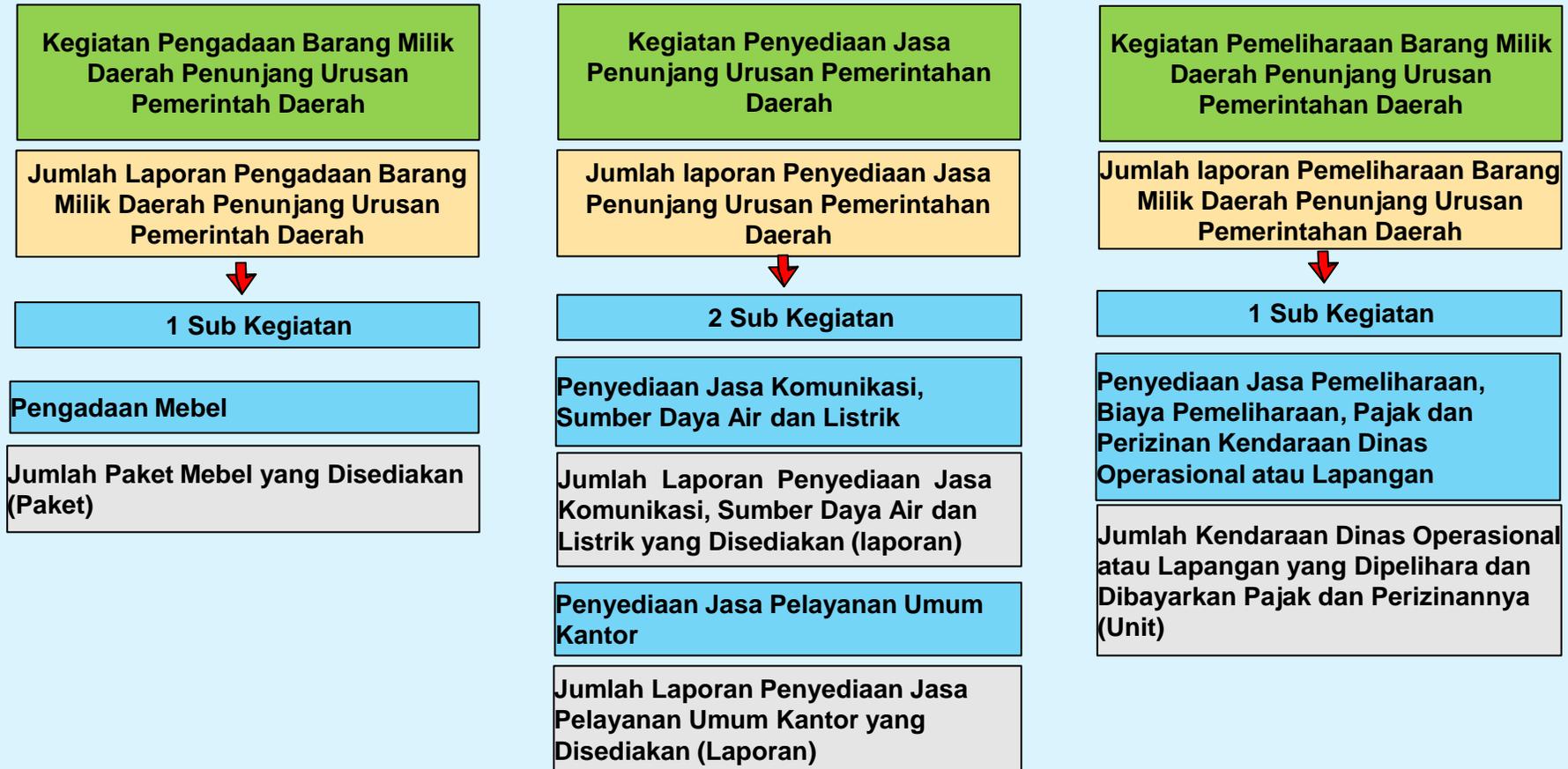
**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)**



**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT SPAM)**

**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**



**5 Sub Kegiatan**

**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)**

**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

**Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

**Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)**

**Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

**Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)**

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

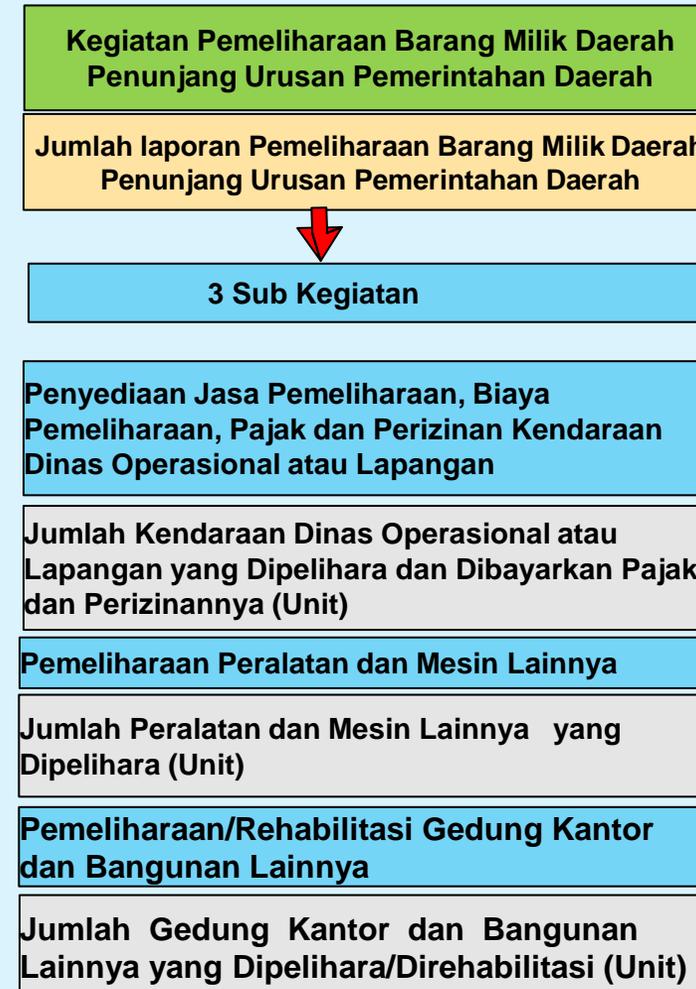
**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**



**1 Sub Kegiatan**

**Pengadaan Mebel**

**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)**



## **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **1.2.1. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air provinsi Sulawesi Tengah ini disusun berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
6. Peraturan daerah nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025
7. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 061/49.1/BAPPEDA-G.ST/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

### **1.2.2. Tugas**

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Cipta Karya dan Sumber Daya Air.

### **1.2.3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

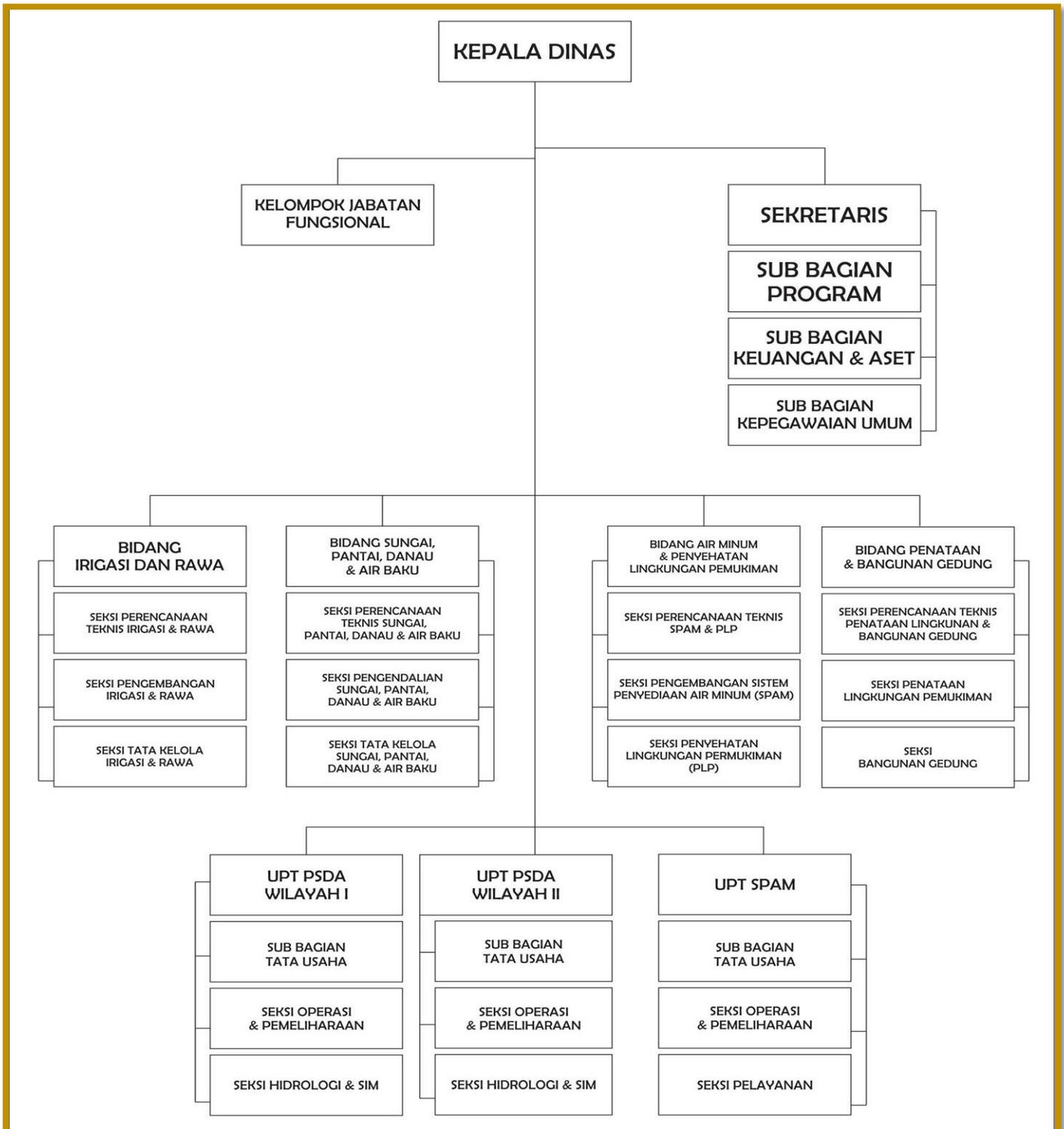
### **1.2.4. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - Sub Bagian Program;
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Irigasi dan Rawa, terdiri atas :
  - Seksi Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa;

- **Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa; dan**
  - **Seksi Tata Kelola irigasi dan Rawa**
4. **Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, terdiri atas :**
- **Seksi Perencanaan Teknik Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;**
  - **Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku; dan**
  - **Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku.**
5. **Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, terdiri atas :**
- **Seksi Perencanaan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;**
  - **Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan**
  - **Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman**
6. **Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung, terdiri atas :**
- **Seksi Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung;**
  - **Seksi Penataan Lingkungan Permukiman; dan**
  - **Seksi Bangunan Gedung**
7. **UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I, terdiri atas :**
- **Sub Bagian Tata Usaha;**
  - **Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan**
  - **Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air**
8. **UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II, terdiri atas :**
- **Sub Bagian Tata Usaha;**
  - **Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan**
  - **Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Air**
9. **UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah, terdiri atas :**
- **Sub Bagian Tata Usaha;**
  - **Seksi Pelayanan; dan**
  - **Seksi Pelaksana Teknis**

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**



### 1.3 Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 menetapkan 5 (lima) isu strategis provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. **Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah;**
2. Dilema Indrusrialisasi Tambang dan Lingkungan Hidup;
3. **Penanganan Pasca Gempa Bumi, Tsunami dan Liquefaksi;**
4. **Revisi Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dan Mitigasi Bencana;**
5. **Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Industri Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah;**
6. Kesenjangan antar Wilayah Kepulauan dengan Wilayah Daratan;
7. Inkoneksitas antar Kegiatan Ekonomi Lokal dengan Kawasan Industri;
8. **Pertanian dan Ketahanan Pangan;**
9. Potensi Geopark Sulawesi Tengah;
10. Isu Disabilitas
11. Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Reformasi Birokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Kebudayaan;
14. **Isu Stunting;**
15. Daerah Tertinggal, Kawasan Desa dan Perdesaan, Kawasan Transmigrasi, serta Kinerja Dana Desa;
16. Stabilitas dan Keamanan Daerah;
17. Pengarusutamaan Transpormasi Digital;
18. Perkebunan dan Deforrestrasi;

Isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air adalah isu strategis **ke-1, ke-3, ke-4, ke-5, ke-8 dan ke-14.**

Permasalahan utama (strategic issued) di bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air yaitu sebagai berikut :

1. Kinerja infrastruktur irigasi mengalami penurunan akibat belum optimalnya Kinerja Sistem Irigasi, hal ini ditunjukkan dengan data hasil survey Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Tahun 2020 sebesar 57,11 % (Kinerja Kurang);
2. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat kegiatan illegal logging dan illegal mining, meningkatnya alih fungsi lahan pada lahan pertanian produktif, rendahnya efisiensi air irigasi akibat borosnya penggunaan air, belum lengkapnya sistem jaringan

- irigasi dan akibat kejadian bencana alam yang mengakibatkan sarana dan prasarana Daerah Irigasi sebagian besar kondisi rusak, rendahnya kinerja Operasi dan Pemeliharaan (OP);
3. Kapasitas kinerja kelembagaan pengelola irigasi dan partisipasi masyarakat petani belum optimal, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia belum memadai, pengelolaan aset dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi masih belum optimal;
  4. Sistem Informasi Sumber Daya Air yang Belum Maksimal;
  5. Kerusakan Tebing Sungai dan Abrasi Pantai;
  6. Daerah yang Belum Mendapat Akses Air Baku;
  7. Pengelolaan Sumber Daya Air Danau belum Terlaksana;
  8. Belum tersedianya peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung Negara untuk kepentingan Strategis Provinsi;
  9. Kurangnya sosialisasi yang mendukung kegiatan penetapan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Provinsi;
  10. Kurangnya pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara;
  11. DED Bangunan Gedung Negara belum mengikuti SNI daerah rawan bencana alam;
  12. Terbatasnya pendanaan dalam rehab rekon Bangunan Gedung Negara;
  13. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
  14. Keterbatasan anggaran untuk menyusun Perda/Pergub bangunan Gedung Negara;
  15. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non teknis tidak melibatkan Pengelola Teknis dalam pengusulan Anggaran Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  16. Terbatasnya anggaran pemeliharaan rutin bangunan gedung negara di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  17. Belum adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani Bangunan Cagar Budaya;
  18. Terbatasnya anggaran pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya;

19. Terbatasnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan gedung Negara;
20. Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Data base infrastruktur jalan lingkungan beserta kelengkapannya belum tersedia;
22. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman;
23. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses air minum layak.
24. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses sanitasi layak dan aman.
25. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses pengelolaan persampahan.
26. Masih adanya potensi peningkatan genangan dikawasan permukiman.

#### **1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana**

##### **1.4.1. Dukungan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan faktor utama sebagai unsur manajemen yang akan menentukan keberhasilan suatu institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yang dituju dan diharapkan. Adapun sumber daya manusia yang saat ini bekerja pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Sekretariat dan bidang-bidang termasuk UPTD PSDA Wilayah I dan UPTD PSDA Wilayah II dan UPT-SPAM adalah sebagai berikut :

**Tabel. 1.1**

Rekapitulasi pegawai per golongan ruang dan jenis kelamin

No	GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	IV/e	0	0	0
	IV/d	1	0	1
	IV/c	0	0	0
	IV/b	1	2	3
	IV/a	5	7	12
	<b>Sub Total</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>17</b>
2	III/d	25	22	47
	III/c	14	12	26
	III/b	18	12	30
	III/a	17	10	27
	<b>Sub Total</b>	<b>74</b>	<b>56</b>	<b>130</b>
3	II/d	22	3	28
	II/c	22	2	19
	II/b	17	0	29
	II/a	12	0	16
	<b>Sub Total</b>	<b>73</b>	<b>5</b>	<b>78</b>
4	I/d	2	0	2
	I/c	3	0	3
	I/b	2	0	2
	I/a	0	0	0
	<b>Sub Total</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL</b>		<b>160</b>	<b>70</b>	<b>232</b>

**Tabel.1.2**

Rekapitulasi pegawai per pendidikan dan jenis kelamin

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	SD	5	0	5
2	SMP	4	0	4
3	SMA/SMK	72	4	76
4	D.I	0	0	0
5	D.II	0	0	0
6	D.III	10	5	15
7	S1/D.IV	54	35	89
8	S2	14	26	40
9	S3	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>159</b>	<b>70</b>	<b>229</b>

#### 1.4.2. Aset dan Sarana Prasarana

Aset merupakan salah satu sarana/prasarana yang berupa harta yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air Daerah, baik itu asset bergerak maupun tidak bergerak, antara lain tanah, peralatan dan mesin baik alat-alat besar maupun alat-alat kecil bergerak maupun tidak bergerak, alat-alat bengkel, perkakas kecil, alat ukur, alat laboratorium, alat kantor dan rumah tangga, bangunan dan gedung, instalasi irigasi. Rincian aset yang dimiliki Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Aset Tetap Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air**

<b>URAIAN</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Tanah	27.089.303.479
Peralatan dan Mesin	28.594.155.430
Gedung dan Bangunan	58.793.641.022
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.684.155.736.072
Aset tetap lainnya	3.700.083.263
Konstruksi dalam pengerjaan	44.396.950.372
Aset Lainnya	56.034.109.779
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1.846.729.869.633</b>

#### 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

##### A. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja berdasarkan hasil evaluasi memberikan kontribusi nilai sebesar 27,43 dari bobot nilai untuk komponen perencanaan kinerja sebesar 30 yang dirinci dalam penilaian 2 (dua) sub komponen sebagai berikut:

##### 1. Perencanaan Strategis

Dari total capaian penilaian komponen perencanaan kinerja memberikan kontribusi nilai sebesar 8,63 dari bobot sebesar 10 yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:

- 1.1) **Pemenuhan Renstra** memperoleh nilai 2 dari bobot nilai 2 Nilai tersebut dipengaruhi karena dokumen Renstra sudah telah memuat hal-hal yang seharusnya dimuat dalam Renstra.
- 1.2) **Kualitas RPJMD/Renstra** memperoleh nilai 4,38 dari bobot nilai 5 Nilai tersebut dipengaruhi karena dokumen Renstra sudah sebagian besar menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 1.3) **Implementasi Renstra** memperoleh nilai 2,25 dari bobot nilai 3 Hal ini disebabkan karena belum sepenuhnya Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen RKA dan pencapaian jangka menengah telah dimonitor pencapaiannya namun belum seluruh rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti.

## **2. Perencanaan Kinerja Tahunan**

Dari total capaian penilaian komponen perencanaan kinerja memberikan kontribusi nilai sebesar 18,80 dari bobot sub komponen sebesar 20 yang terdiri atas penilaian sub-sub komponen sebagai berikut:

- 2.1) **Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan** memperoleh nilai 4 dari bobot nilai 4, secara formal dokumen perencanaan kinerja tahunan memuat sasaran, indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut dan dibuat sebelum mengajukan anggaran.
- 2.2) **Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan** memperoleh nilai 10 dari bobot nilai 10 Hal ini disebabkan dokumen perencanaan tahunan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2.3) **Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan** memperoleh nilai 4.80 dari bobot nilai 6 Hal ini disebabkan karena target kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward), dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja

dengan yang kurang (tidak) berkinerja, sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan.

## **B. Pengukuran Kinerja**

Komponen pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi memberikan kontribusi nilai sebesar 20,31 dari bobot nilai untuk komponen pengukuran kinerja sebesar 25 yang dirinci dalam penilaian 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut

- 1) Pemenuhan Pengukuran** memperoleh nilai 5,00 dari bobot nilai 5 Hal ini disebabkan karena dokumen kinerja memenuhi kriteria pengukuran yang telah ditetapkan.
- 2) Kualitas pengukuran** memperoleh nilai 10,63 dari bobot nilai 12,50. Hal ini disebabkan karena masih terdapat Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, Indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya serta pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi, pengukurannya belum menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja belum dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
- 3) Implementasi pengukuran** memperoleh nilai 4,69 dari bobot nilai 7,50 Hal ini disebabkan karena IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, namun belum sepenuhnya untuk penilaian kinerja, target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment dan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

**C. Pelaporan Kinerja**

Komponen pelaporan kinerja berdasarkan hasil evaluasi memberikan kontribusi nilai sebesar 9,99 dari bobot nilai untuk komponen pengukuran kinerja sebesar 15 yang dirinci dalam penilaian 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut

- 1) Pemenuhan Pelaporan** dari total capaian penilaian komponen pelaporan kinerja memberikan kontribusi nilai sebesar 3 dan bobot sub komponen sebesar 3 Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan pelaporan kinerja telah disusun dan telah disampaikan tepat waktu dan menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja** dari total capaian penilaian komponen pelaporan kinerja memberikan kontribusi nilai sebesar 4,29 dari bobot sub komponen sebesar 7,50 Hal ini menunjukkan bahwa informasi menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja** dari total capaian penilaian komponen pelaporan kinerja memberikan kontribusi nilai sebesar 2,25 dari bobot sub komponen sebesar 4,50 Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja, dan belum sepenuhnya informasi yang disajikan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

**D. Evaluasi Internal**

Komponen pelaporan kinerja berdasarkan hasil evaluasi memberikan kontribusi nilai sebesar 6,85 dari bobot nilai untuk komponen evaluasi internal sebesar 10 yang dirinci dalam penilaian 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut

- 1) Pemenuhan Evaluasi** dari total capaian penilaian komponen pemenuhan evaluasi memberikan kontribusi nilai sebesar 1,71 dari bobot sub komponen sebesar 2 Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi program hanya menginformasikan pelaksanaan program serta

kegiatannya, tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program.

- 2) **Kualitas Evaluasi** dari total capaian peniaian komponen memberikan kontribusi nilai sebesar 2.64 dari sub bobot komponen sebesar 5 Hal ini disebabkan bahwa evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan dalam rangka pengendalian kinerja dan memberikan alternatif-alternatif perbaikan.
- 3) **Pemanfaatan Evaluasi** dari total capaian penilaian komponen pelaporan kinerja memberikan kontribusi nilai sebesar 1,88 dari bobot sub komponen sebesar 3 Hal ini disebabkan hasil evaluasi program dan hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program.

#### **E. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi**

Komponen pencapaian sasaran / kinerja organisasi berdasarkan hasil evaluasi memberikan kontribusi nilai sebesar 11,63 dari bobot nilai untuk komponen pencapaian sasaran / kinerja organisasi sebesar 20,00 yang dirinci dalam penilaian 2 (dua) sub komponen sebagai berikut:

- 1) **Kinerja yang dilaporkan (Output)** dari total capaian penilaian komponen membrikan kontribusi nilai sebesar 2,25 dari sub bobot nilai 7.5 Hal ini disebabkan target yang dilaporkan (output) belum sepenuhnya dapat dicapai, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi mengenai kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- 2) **Kinerja yang dilaporkan (outcome)** dari total capaian penilaian komponen memberikan konstribusi nilai sebesar 9,38 dari sub bobot nilai 12,5 Hal ini disebabkan target yang dilaporkan (outcome) dapat dicapai, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.

#### **F. Rekomendasi**

Rekomendasi atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi

Sulawesi Tengah tahun sebelumnya sebagian telah di tindak lanjuti.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas kami merekomendasikan Kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja utama terpeliharanya infrastruktur dikawasan strategis provinsi merupakan proses dari tujuan namun sebuah parameter yang dapat diukur pencapaiannya.
- b. Membuat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring renstra.
- c. Pengukuran kinerja harus dilakukan secara berjenjang. dimana terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai dengan staf.
- d. Kedepanya capaian IKU agar dijadikan dasar penilaian kinerja, reward atau punishment serta promosi atau kenaikan/penurunan peringkat.
- e. Informasi kinerja dalam laporan kinerja agar dapat diandalkan, datanya valid, dapat ditelusuri kesumber datanya dan diperoleh dari sumber yang kompoten.
- f. Informasi yang disajikan harus digunakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan tertuang dalam laporan kinerja serta laporan kinerja menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.
- g. Laporan kinerja harus menyajikan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya.
- h. Hasil Evaluasi program disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- i. Evaluasi Program harus menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program, dan evaluasi Program telah di sertai rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinerja. Pemantauan Rencana aksi harus memberikan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan harus memberikan alternatif perbaikan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

#### **2.1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan tujuan yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun 2026.

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah menjabarkan sasaran strategis dan indikator Kinerja yang akan dicapai secara tahunan selama periode Rencana Strategis. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis, disajikan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Perangkat Daerah "Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah"**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3			4	5	6	7	8	9
<b>Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM</b>										
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Presentase kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase indikator program Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang inovatif dan kolaboratif	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien			Indeks Kepuasan Masyarakat ( <i>customer/stakeholder</i> )	77	79	82	85	88
		Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah			Nilai SAKIP Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air	74	76	78	80	82
3	Terwujudnya Efisiensi dan efektifitas Pengelolaan keuangan guna mendukung Kemandirian Fiskal Daerah				Persentase Realisasi anggaran	98,57%	98,68%	98,78%	98,89%	99,00%
<b>Misi 4 : Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah</b>										
4	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir serta Abrasi Pantai	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Air Baku dan Sungai guna mencegah terjadinya banjir serta Abrasi Pantai	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	34,20%	35,12%	35,30%	36,05%	36,76%
					Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	17,10%	25,14%	29,77%	36,58%	42,35%
					Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi	12,28%	13,91%	14,92%	15,93%	17,44%
					Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi	3,66%	4,99%	6,32%	7,66%	8,99%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3			4	5	6	7	8	9
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pembangunan Infrastruktur Keciaptakaryaan	Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum	Presentase Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.	44,08%	45,42%	51,50%	55,08%	57,00%	
				Persentase Penduduk Berakses Air Minum	15,38%	15,53%	15,60%	30,46%	30,53%	
	Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	Presentase Pengelolaan air limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional	16,67%	17,05%	17,81%	18,95%	20,47%	
				Persentase rumah tinggal bersanitasi	0,078%	0,093%	0,102%	0,109%	0,115%	
			Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah	15,38%	23,08%	30,77%	38,46%	46,15%	
			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas daerah genangan yang tertangani	3,89%	4,07%	4,25%	4,43%	4,61%	
				Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi)	3,55%	4,56%	5,91%	7,09%	8,31%	
	Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	Presentase pengelolaan penataan ruang dan	Pengembangan Permukiman	Persentase penanganan infrastruktur di KSP	21,89%	23,67%	26,37%	37,25%	41,70%	
			Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan	23,33%	26,67%	33,33%	40,00%	46,67%	
			Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP	18,57%	20,00%	24,29%	28,57%	32,86%	

## **2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran dapat tercapai. Strategi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapai kelancaran dan keterpaduan sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok urusan pemerintahan daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah mempedomani dokumen perencanaan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
3. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Tabel 2.2

## Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2026 Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RKA, DPA)</li> <li>b. Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD secara berkala</li> </ul>
2.	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara konsisten dan komprehensif</li> </ul>
3.	Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah	Melakukan perumusan kebijakan dan Pendampingan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan</li> <li>b. Koordinasi dan monitoring pencegahan dan pemberantasan korupsi</li> </ul>
4.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyusunan belanja daerah sesuai dengan program prioritas daerah</li> <li>b. Melaksanakan rasionalisasi dalam perencanaan penganggaran daerah</li> </ul>
		Meningkatkan Penatausahaan, Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan standarisasi Barang</li> </ul>

			<p>milik daerah</p> <p>b. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan barang milik daerah</p>
5.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir	Meningkatkan penyediaan pengaman pantai, bendungan, Irigasi dan penyediaan air baku	<p>a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengaman pantai</p> <p>b. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bendungan dan sejenisnya</p> <p>c. Pengelolaan penyediaan air baku</p> <p>d. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder</p> <p>e. Mengoptimalkan Koordinasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa</p>
6.	Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum	Meningkatkan system penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota	<p>a. Peningkatan kapasitas SDM</p> <p>b. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pelatihan, sosialisasi kepada Pemda Kab/Kota dan masyarakat</p> <p>c. Penyusunan kebijakan dan strategi sistem penyediaan air minum</p> <p>d. Pembangunan jaringan perpipaan baru dan pemeliharaan SPAM</p> <p>e. Peningkatan jaringan SPAM</p> <p>f. Perluasan jaringan SPAM</p> <p>g. Memfasilitasi kerjasama pengelolaan</p>

			<p><b>SPAM</b></p> <p>h. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan Pengelolaan SPAM</p> <p>i. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Penyediaan Air Minum</p>
7.	Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan Sistem Air Limbah	<p>a. Peningkatan kapasitas SDM</p> <p>b. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pelatihan, sosialisasi kepada Pemda Kab/Kota dan masyarakat</p> <p>c. Penyusunan kebijakan dan strategi sistem pengelolaan air limbah</p> <p>d. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional</p> <p>e. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/ Kota</p>
		Meningkatkan penyediaan drainase dan sarana pendukungnya	<p>a. Penyusunan Kebijakan Sistem drainase perkotaan</p> <p>b. Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan drainase</p> <p>c. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase</p>
8.	Meningkatnya pengelolaan penataan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur	<p>a. Pengembangan infrastruktur kawasan strategis daerah</p>

	<b>ruang dan permukiman</b>	<b>permukiman dan penataan bangunan di Kawasan strategis</b>	<b>b. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah</b>
--	-----------------------------	--	--

2.3. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022



**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

**Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**

**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**

**Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**

**4 SUB KEGIATAN (BIDANG AMPL)**

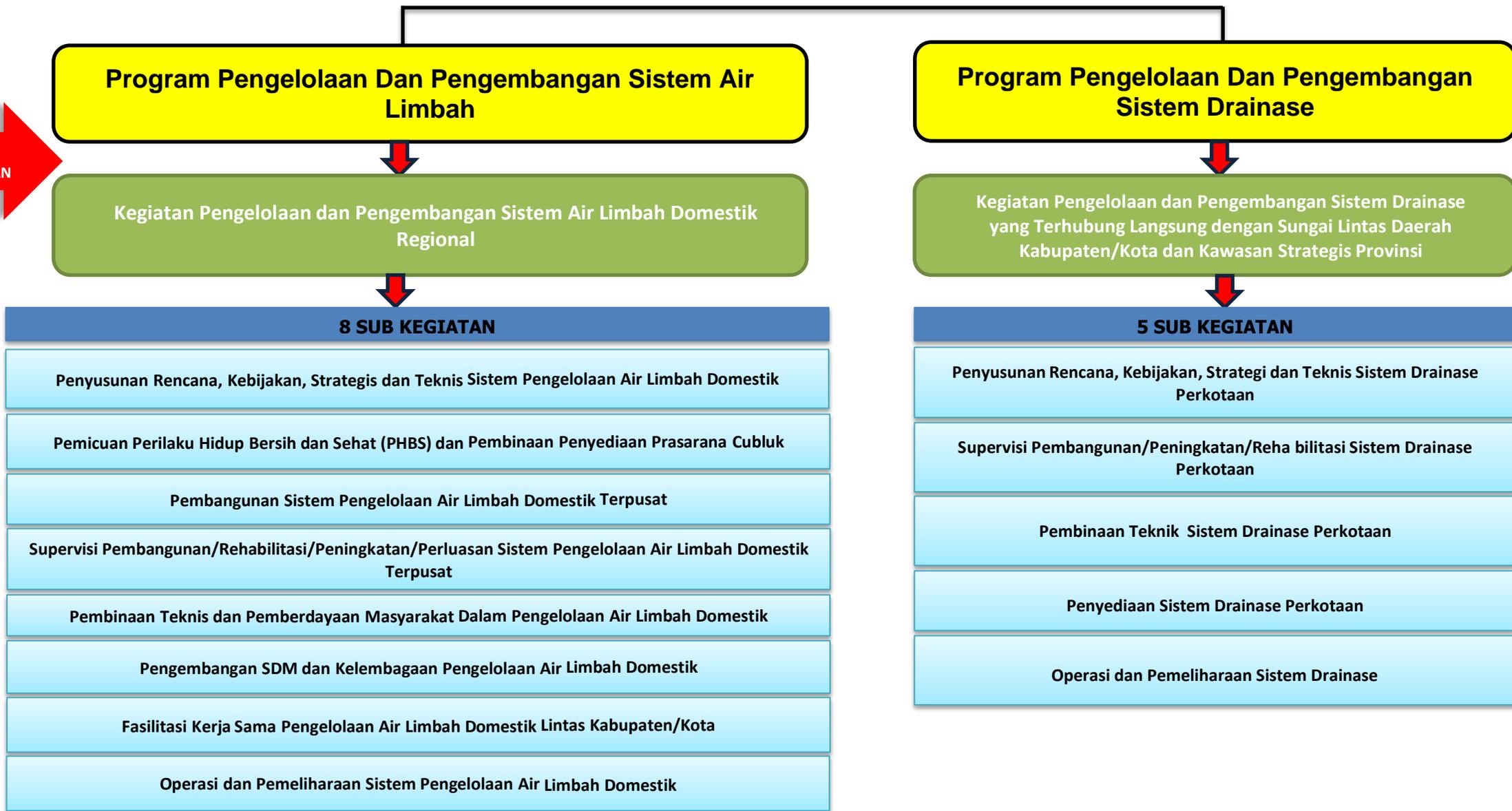
**6 SUB KEGIATAN (UPT SPAM)**

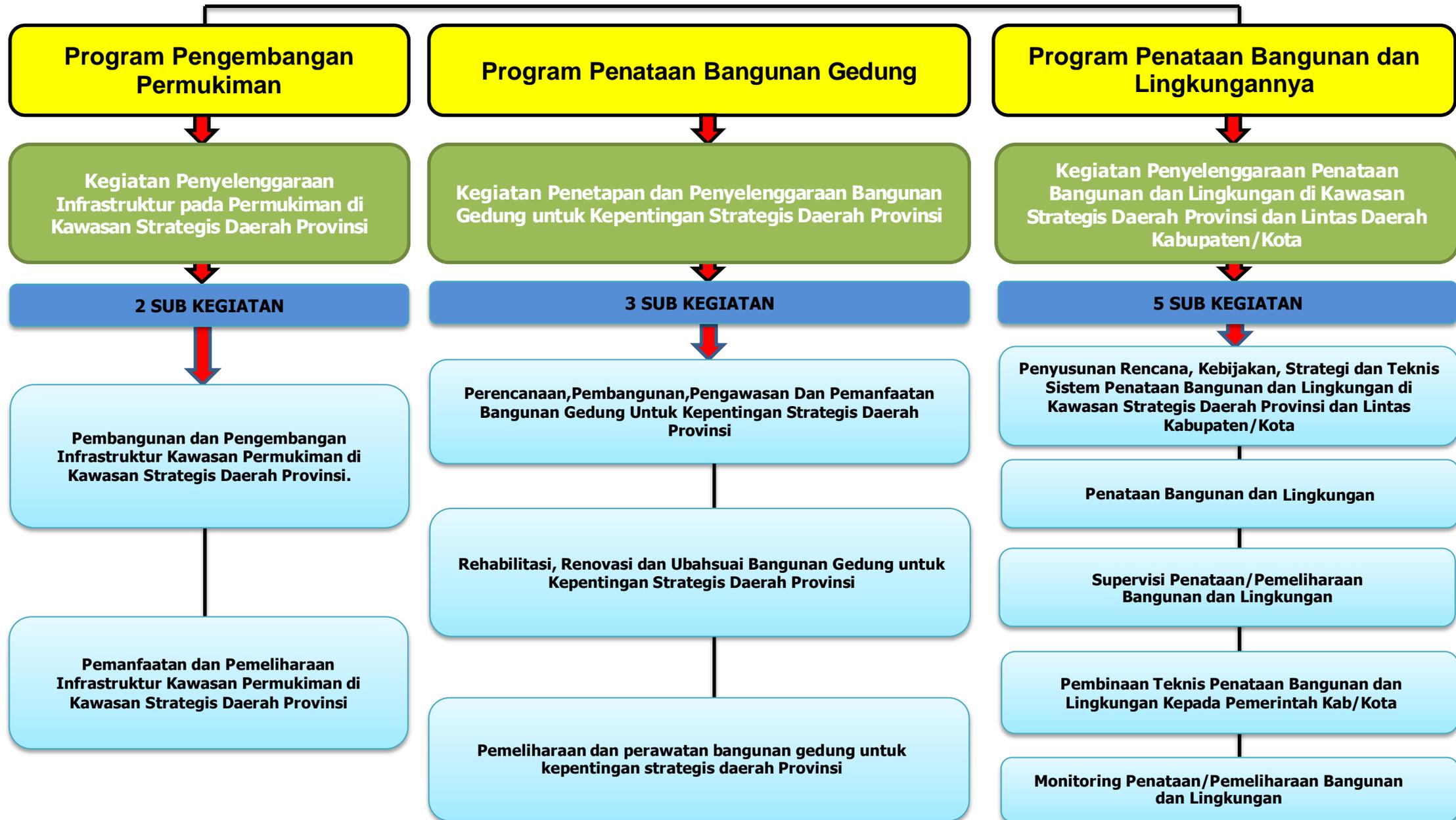
**5 SUB KEGIATAN (BIDANG AMPL)**

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM
- Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
- Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas

- Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan
- Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
- Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
- Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
- Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
- Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
- Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
- Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
- Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan





# Program Pengelolaan Sumber Daya Air



**Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

**Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

**8 Sub Kegiatan (Bidang Sungai Pantai)**

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
- Pembangunan Unit Air Baku
- Pembangunan Tanggul Sungai
- Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
- Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
- Normalisasi/Restorasi Sungai
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi

**3 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. I)**

- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
- Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi

**4 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. II)**

- Normalisasi / Restorasi Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai
- Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi

**7 Sub Kegiatan (Bidang Irwa)**

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
- Pembangunan Bendung Irigasi
- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Bendung Irigasi
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi permukaan

**4 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. I)**

- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
- Operasional Unit Pengelola Irigasi
- Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

**4 Sub Kegiatan (UPT PSDA WIL. II)**

- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
- Operasional Unit Pengelola Irigasi
- Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi



**Kegiatan Administrasi Keuangan  
Perangkat Daerah**



**2 Sub Kegiatan**

**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

**Koordinasi dan Penyusunan Laporan  
Keuangan Akhir Tahun SKPD**

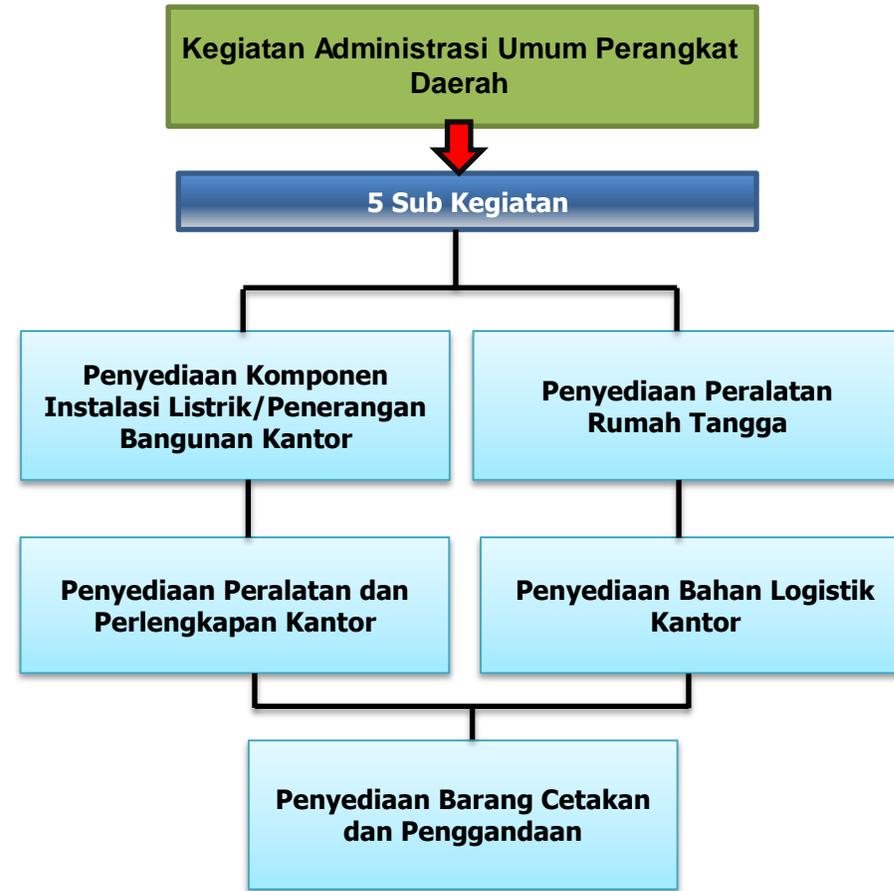
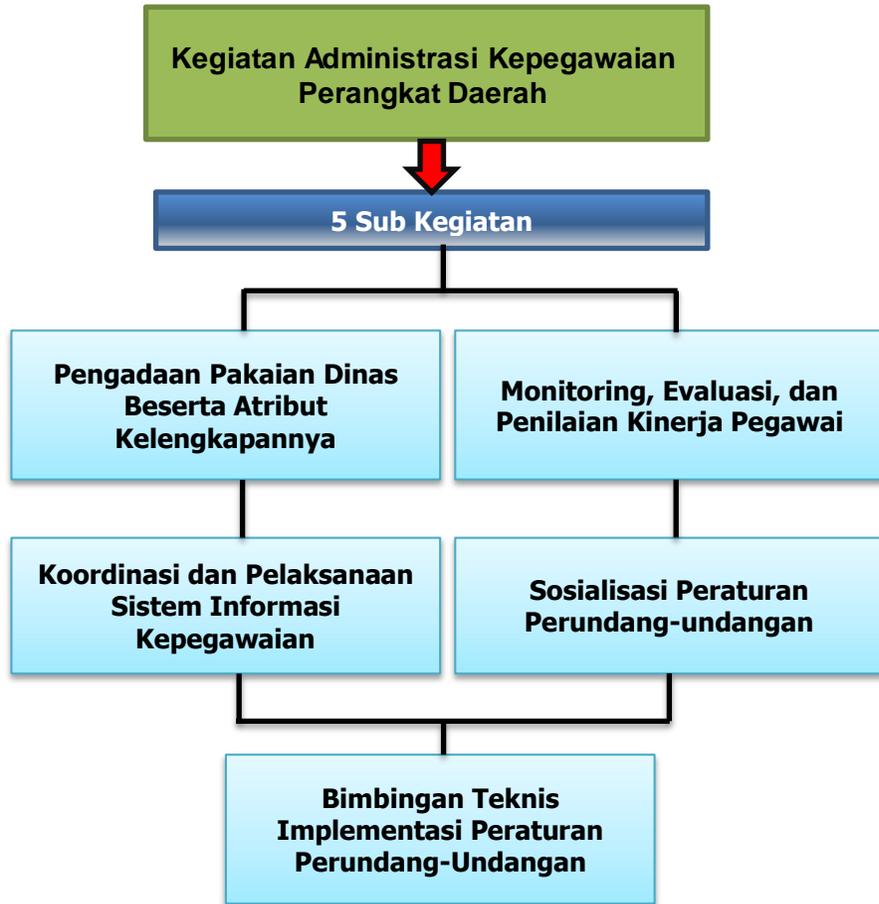
**Kegiatan Administrasi Barang Milik  
Daerah pada Perangkat Daerah**



**2 Sub Kegiatan**

**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan  
Barang Milik Daerah SKPD**

**Pembinaan, Pengawasan, dan  
Pengendalian  
Barang Milik Daerah pada SKPD**



**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



**4 Sub Kegiatan**

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



**3 Sub Kegiatan**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**



**5 Sub Kegiatan**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

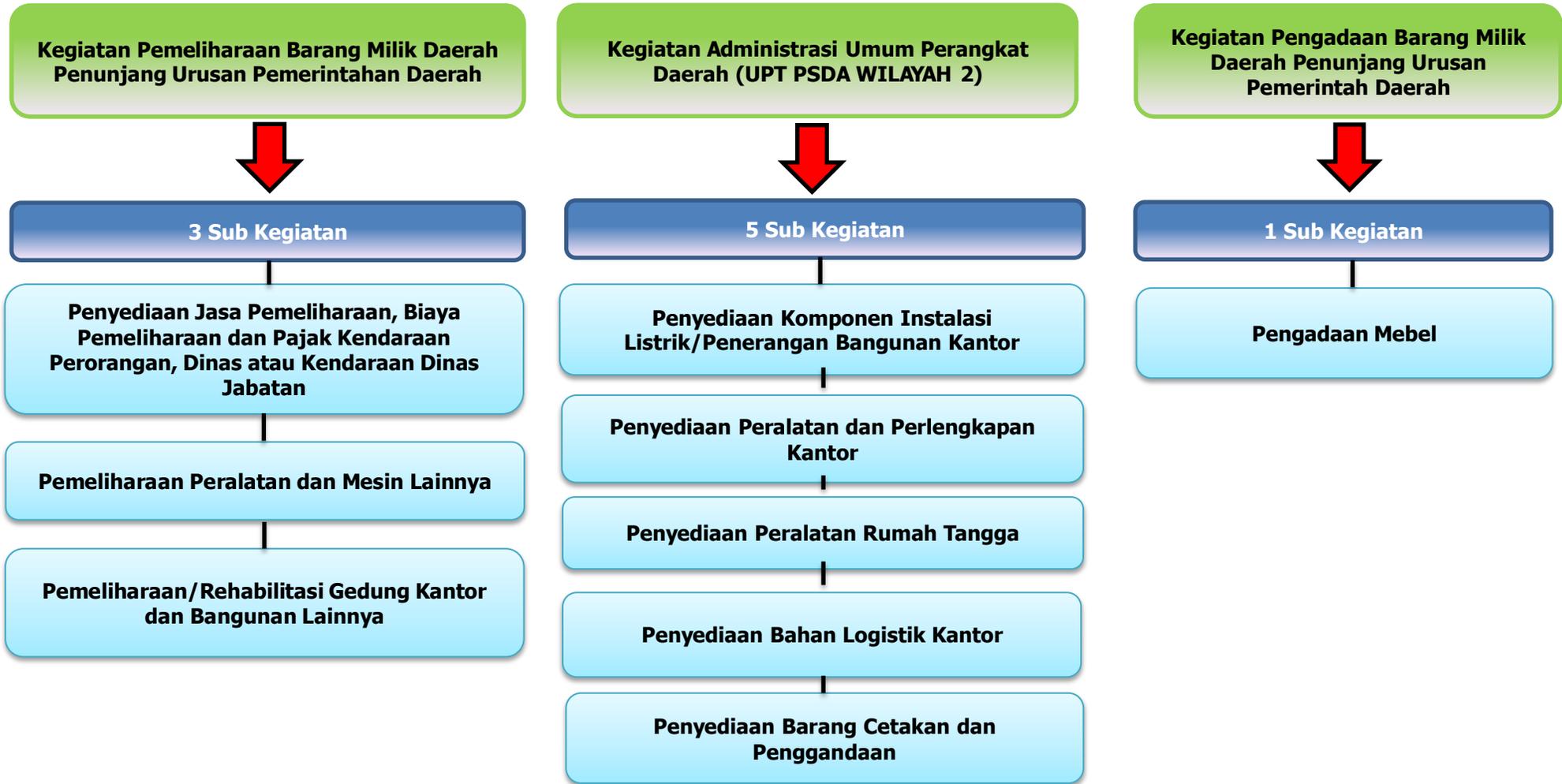
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

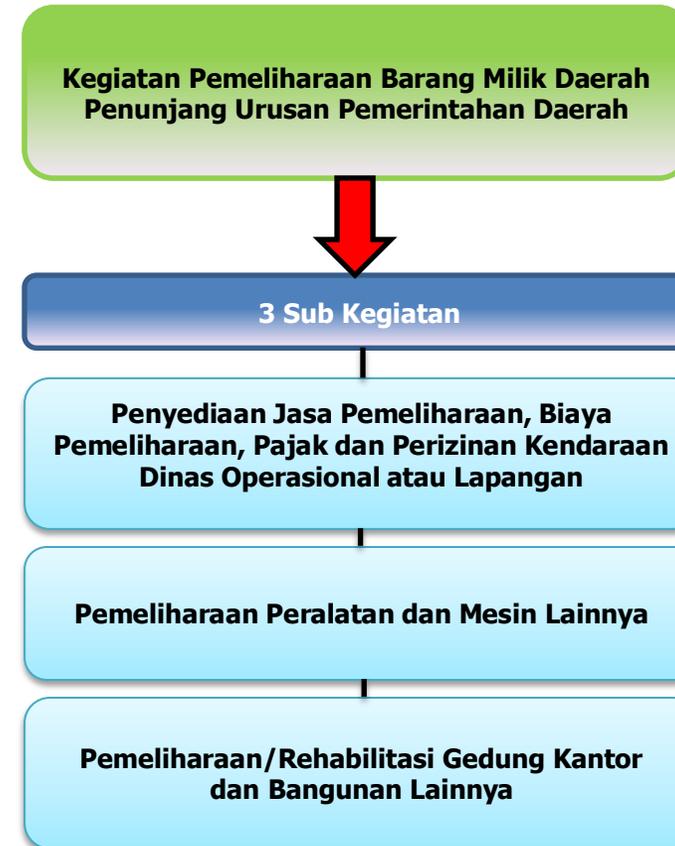
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya









#### **2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi/unit kerja pelaksanaannya.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. IKU ditetapkan dengan memilih indikator kinerja yang ada dalam Renstra 2021-2026 Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021-2026



**DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
*Tahun 2021-2026*

**Instansi** : Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah

**Tugas** : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur bidang Keciaptakaaryaan dan Sumber Daya Air.

**Fungsi** :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA

Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum.
4. Pelaksanaan administrasi bidang kesekretariatan, bidang Irigasi dan Rawa, bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, bidang Permukiman dan Bangunan Gedung, UPT PSDA Wilayah I dan Wilayah II, dan UPT Sistem Penyediaan Air Minum; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

**Tujuan** : 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan  
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

**Indikator Tujuan :**

1. Indeks Penyediaan Air Minum, Air Limbah, Drainase, Persampahan serta Pengelolaan Penataan Ruang dan Permukiman;
2. Indeks Pengelolaan Sumber Daya Air.

**Target Kinerja :**

1. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi;
2. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir;
3. Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Provinsi;
4. Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi;
5. Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten Kota;
6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum;
7. Persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah;
8. Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh SPAL Regional;
9. Persentase rumah tinggal bersanitasi;
10. Persentase Luas daerah genangan yang tertangani;
11. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (Propinsi);
12. Persentase penanganan infrastruktur di KSP;
13. Persentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan;
14. Persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2021-2026**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
I.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir serta Abrasi Pantai	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Air Baku dan Sungai guna mencegah terjadinya banjir serta Abrasi Pantai	A. Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) ditahun eksisting / Luas daerah irigasi kewenangan Provinsi X 100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (ha)</li> <li>2. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dibangun (ha)</li> <li>3. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan (ha)</li> <li>4. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang direhabilitasi (ha)</li> <li>5. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dioperasi (ha)</li> <li>6. Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dipelihara (ha)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BIDANG IRIGASI DAN RAWA</li> <li>2. UPT PSDA WIL I &amp; II</li> </ol>
			B. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Provinsi (ha) / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Provinsi (ha) X 100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Provinsi (ha)</li> <li>2. Data luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Provinsi (ha)</li> <li>3. Data Daerah Rawan banjir</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SUNGAI, PANTAI, DANAU DAN AIR BAKU</li> <li>2. UPT PSDA WIL I DAN II</li> </ol>
			C. Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Provinsi (m) / Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi (m) X 100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Provinsi (ha)</li> <li>2. Data luas kawasan permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Provinsi (ha)</li> <li>3. Data Daerah Rawan Abrasi Pantai</li> </ol>	

			D. Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi / Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Baku di WS Provinsi X 100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Baku di WS Provinsi (ha)</li> <li>2. Data Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi.</li> </ol>	
			$\frac{\text{Indikator (A) + Indikator (B) + Indikator (C) + Indikator (D)}}{4 \text{ Indikator}} \times 100 \%$	Data Indikator (A), Data Indikator (B), Data Indikator (C), dan Indikator (D)	Bidang IRWA, Bidang SPDAB, UPT Wil I dan UPT Wil II
II.	Meningkatnya pengelolaan penyediaan air minum	Presentase Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum	A. Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota / Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi bersangkutan X 100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di Provinsi (ha)</li> <li>2. Data Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN</li> <li>2. UPT SPAM</li> </ol>
			B. Penduduk berakses air minum / Jumlah Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Penduduk berakses air minum</li> <li>2. Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota</li> </ol>	
		$\frac{\text{Indikator (A) + Indikator (B)}}{2 \text{ Indikator}} \times 100 \%$	Data Indikator (A) dan Data Indikator (B)		
III.	Meningkatnya pengelolaan air limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	Presentase Pengelolaan air limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	A. Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional / Total kapasitas pengelolaan limbah SPAL Domestik Regional X 100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional</li> <li>2. Data kapasitas pengelolaan limbah SPAL Domestik Regional</li> </ol>	BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
			B. Jumlah Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pemahaman pengelolaan sampah / Jumlah kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Jumlah Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan pemahaman pengelolaan</li> <li>2. Data Jumlah kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan</li> </ol>	
		C. Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) / Panjang seluruh drainase di KSP (Km) X 100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)</li> <li>2. Data Panjang seluruh drainase di KSP di KSP (Km<sup>2</sup>)</li> </ol>		

			D. Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi/Jumlah rumah tinggal di KSP X 100	1. Data Jumlah rumah tinggal berakses 2. Data Jumlah rumah tinggal di KSP	
			E. Luas daerah genangan tertangani (Km <sup>2</sup> ) / Luas daerah genangan di KSP (Km <sup>2</sup> ) X 100	1. Data Luas daerah genangan tertangani (Km <sup>2</sup> ) 2. Data Luas daerah genangan di KSP (Km <sup>2</sup> )	
			$\frac{\text{Indikator (A)} + \text{Indikator (B)} + \text{Indikator (C)} + \text{Indikator (D)} + \text{Indikator (E)}}{5 \text{ Indikator}} \times 100 \%$	Data Indikator (A), Data Indikator (B), Data Indikator (C), Indikator (D) dan Indikator (E)	
IV.	<b>Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman</b>	A. Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Ditangani di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (sistem jaringan) / Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (sistem jaringan) X 100	1. Data Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (sistem jaringan) 2. Data Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Ditangani di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (sistem jaringan)	BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN GEDUNG
			B. Jumlah Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi yang dilakukan penataan (unit) / Jumlah Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi (unit) X 100	1. Data Jumlah Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi (unit) 2. Data Jumlah Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi yang dilakukan penataan (unit)	

			<p>C. Jumlah Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditangani (Kawasan) / Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan) X 100</p>	<p>1. Data Jumlah Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan)</p> <p>2. Data Jumlah Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang ditangani (Kawasan)</p>	
			<p><math>\frac{\text{Indikator (A) + Indikator (B) + Indikator (C)}{3 \text{ Indikator}} \times 100 \%</math></p>	<p>Data Indikator (A), Data Indikator (B), Data dan Indikator (C)</p>	

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**I. ABD. RAZAK. MT**  
Pembina Utama Madya

Nip. 19620605 199303 1 015

## 2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasikinerja aparatur.

Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah membuat PK sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi, Renstra 2021-2026, ketersediaan anggaran sebagaimana yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2022, serta mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disusun berdasarkan target dan kinerja yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk rumusan Perjanjian Kinerja (PK) setingkat Kepala Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah (Eselon II) disajikan pada **Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Cipta karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**, sebagai berikut.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ABD. RAZAK, MT

Jabatan : KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI  
SULAWESI TENGAH.

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. RUSDI MASTURA

Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 25 Februari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN  
SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



H. RUSDI MASTURA



Ir. ABD. RAZAK, MT

Pembina Utama Madya

Nip. 19620605 199303 1 015

**Tabel 2.4**

**Perjanjian Kinerja Dinas Cipta karya dan Sumber Daya Air  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir serta Abrasi Pantai	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Air Baku dan Sungai guna mencegah terjadinya banjir serta Abrasi Pantai	16.81%
2.	Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum	Presentase Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum	29.73%
3.	Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	Presentase Pengelolaan air limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	7.91%
4.	Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	Presentase pengelolaan penataan ruang dan permukiman	21.26%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN	
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp.	43,771,639,244	Rp.	26,348,397,260 (DAU)
				Rp.	16,074,329,000 (DAK)
				Rp.	1,348,912,984 (IPDMIP)
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp.	13,949,949,275		
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp.	623,828,300		
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp.	-		- Dana Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dialihkan Ke Program Penataan Bangunan Lingkungan
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp.	9,494,053,075		
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp.	40,040,824,676		
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp.	27,058,314,875		
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp.	4,149,592,300		
<b>TOTAL</b>		<b>Rp.</b>	<b>139,088,201,745</b>		

Palu, 25 Februari 2022

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**  
  
**H. RUSDY MASTURA**

  
**Ir. ABD RAZAK, MT**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620605 199303 1 015

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air selaku pengemban amanah masyarakat melaporkan Akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indicator kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Penilaian capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek daerah. Predikat nilai capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
3	66% ≤ 75%	Sedang	Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51% ≤ 65%	Rendah	Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran

yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan evaluasi Kinerja IKU merupakan Indikator Kinerja dan Target digunakan/yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2022 Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah.

### 3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 maka terdapat 4 (empat) kinerja utama yang diperjanjikan dengan capaian sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama presentase pengelolaan dan penyediaan air minum mencapai nilai 69.21% **(sedang)**, 1 (satu) indikator kinerja program mencapai nilai 93.35% **(sangat tinggi)** yaitu Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota, dan 1 (satu) indikator kinerja program bernilai 0 **(sangat rendah)** yaitu Persentase Penduduk Berakses Air Minum sehingga perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar pada program tersebut.
2. Indikator kinerja utama, Presentase pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas mencapai nilai 61.50 % **(Rendah)** sehingga perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar, 3 (tiga) indikator kinerja program mencapai nilai diatas 75 % **(tinggi)** yaitu pada Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional, Persentase Luas daerah genangan yang tertangani, dan Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi) serta 1 (satu) indikator kinerja program bernilai 0 **(sangat rendah)** sehingga perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar pada program tersebut.

3. Indikator Kinerja Utama, Presentase pengelolaan penataan ruang dan permukiman mencapai nilai 87.47 % **(tinggi)**. 2 (dua) indikator kinerja program mencapai nilai memuaskan yaitu Presentase penanganan infrastruktur di KSP dengan nilai 106.49 % **(sangat tinggi)** dan Presentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP dengan nilai 113.09 % **(sangat tinggi)** serta 1 (satu) indikator kinerja program bernilai 49.21 % **(sangat rendah)** sehingga perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar.
4. Indikator Kinerja Utama, Presentase pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir serta Abrasi Pantai mencapai nilai 76.15 % **(tinggi)**. 2 (dua) indikator kinerja program mencapai nilai 102.61 % dan 92,90 % **(sangat tinggi)** yaitu Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi dan Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi. 1 (satu) indikator program bernilai 83.33 % **(tinggi)** yaitu Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi serta 1 (satu) indikator kinerja program bernilai 39.18 % **(sangat rendah)** yaitu Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir.

Tabel 3.2

## Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (Perjanjian Kinerja)	Setelah Revisi (DPA-P)			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				Target	Realisasi	Capaian %	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum	Persentase pengelolaan dan penyediaan air minum	29,73 %	29,73 %	20,58 %	69,21 %	69,21 %
		Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	44,08 %	44,08 %	41,15 %	93,35 %	93,35 %
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	15,38 %	0 %	0 %	0,00 %	0,00 %
2	Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	Persentase pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	7,91 %	7,91 %	4,87 %	61,50 %	61,50 %
		Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional	16,67 %	16,67 %	12,83 %	76,96 %	76,96 %
		Presentase rumah tinggal bersanitasi	0,078 %	0 %	0 %	0,00 %	0,00 %
		Persentase Luas daerah genangan yang tertangani	3,89 %	3,89 %	3,53 %	90,75 %	90,75 %
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi)	3,55 %	3,55 %	3,10 %	87,32 %	87,32 %
3	Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	Persentase pengelolaan penataan ruang dan permukiman	21,26 %	21,26 %	18,60 %	87,47 %	87,47 %
		Persentase penanganan infrastruktur di KSP	21,89 %	21,89 %	23,31 %	106,49 %	106,49 %
		Persentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan	23,33 %	23,33 %	11,48 %	49,21 %	49,21 %
		Persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP	18,57 %	18,57 %	21 %	113,09 %	113,09 %
4	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir serta Abrasi Pantai	Persentase pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir serta Abrasi Pantai	16,81 %	16,81 %	12,80 %	76,15 %	76,15 %
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	34,20 %	34,20 %	28,50 %	83,33 %	83,33 %
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	17,10 %	17,10 %	6,70 %	39,18 %	39,18 %
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi	12,28 %	12,28 %	12,60 %	102,61 %	102,61 %
		Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi	3,66 %	3,66 %	3,40 %	92,90 %	92,90 %

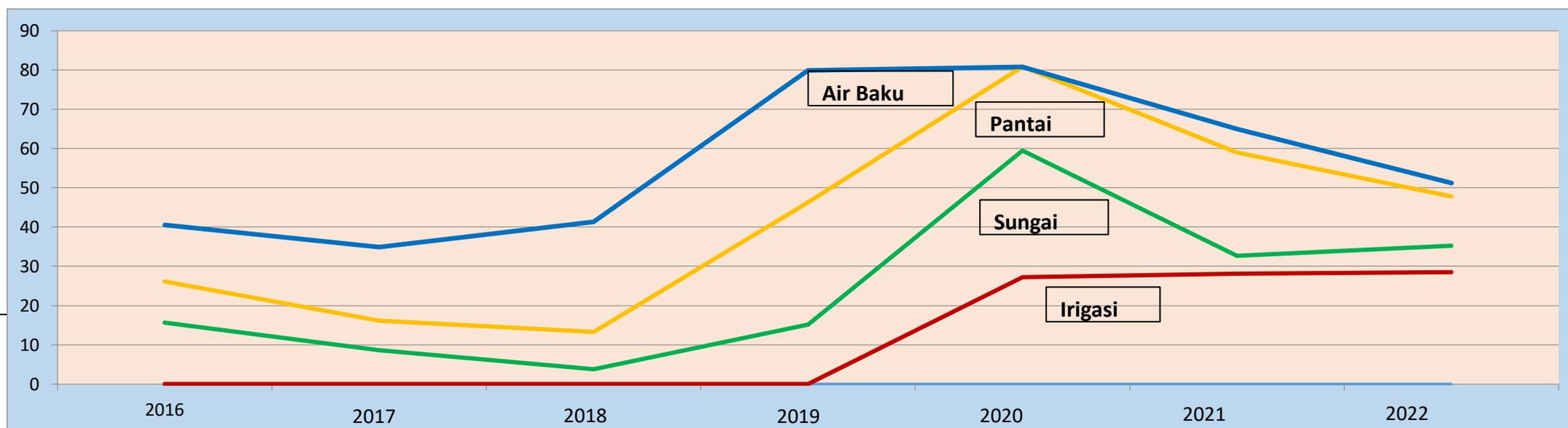
**3.1.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Dinas Cipta Karya dan sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, termuat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir  
Program pengelolaan Sumber Daya Air

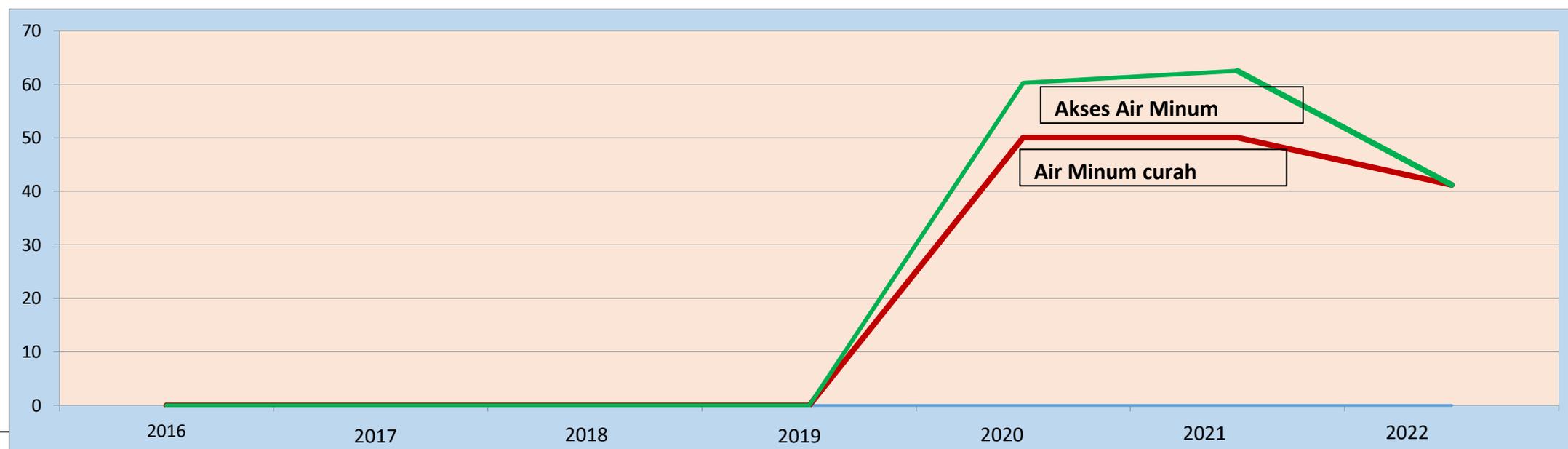
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun berjalan 2022	Realisasi tahun ke- (-t)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	28,50 %	-	-	-	-	27,19 %	28.10 %
2.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	6,70 %	15,70 %	8,62 %	3,78 %	15,15 %	32,23 %	4,61 %
3.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi	12,60 %	10,43 %	7,50 %	9,52 %	31,17 %	21,34 %	26,24 %
4.	Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi	3,40 %	14,38 %	18,76 %	28,05 %	33,59 %	-	6,01 %



Tabel 3.5

**Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir  
Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun berjalan 2022	Realisasi tahun ke- (-t)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	41,15 %	-	-	-	-	50 %	50 %
2.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	-	-	-	-	-	10,22 %	12.50 %

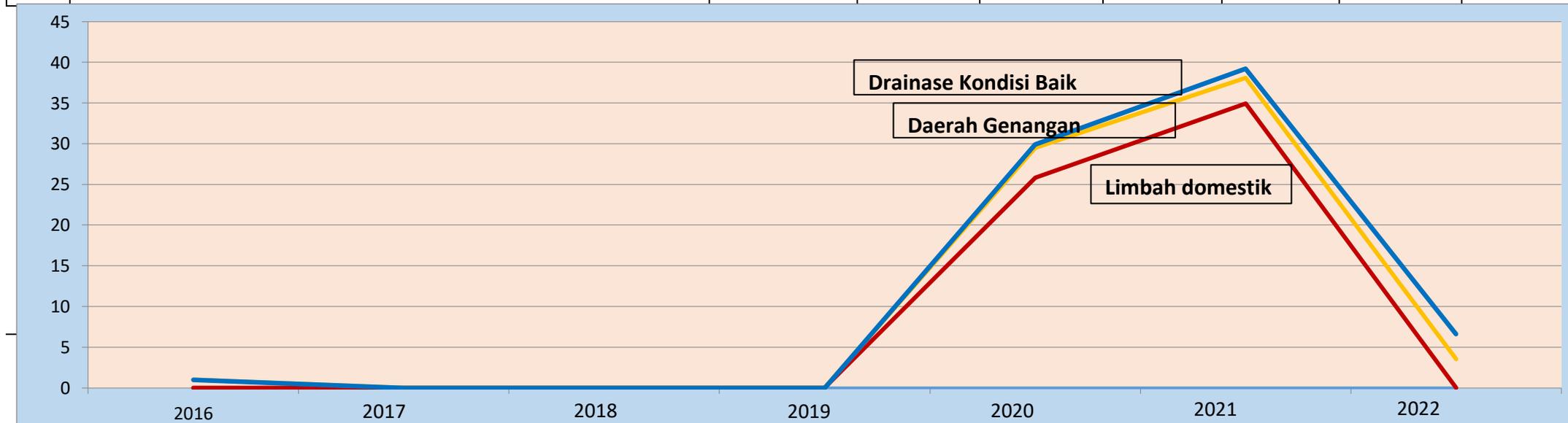


Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Pemerintah Kabupaten Pengant

Tabel 3.6

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir  
Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dan Drainase

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun berjalan 2022	Realisasi tahun ke- (-t)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional	12,83 %	-	-	-	-	25,80 %	34,92 %
2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	-	-	-	-	-	0,06 %	0,068 %
3.	Persentase Luas daerah genangan yang tertangani	3,53 %	-	-	-	-	3,71 %	3,15 %
4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi)	3,10 %	-	-	-	-	0,37 %	1,15 %

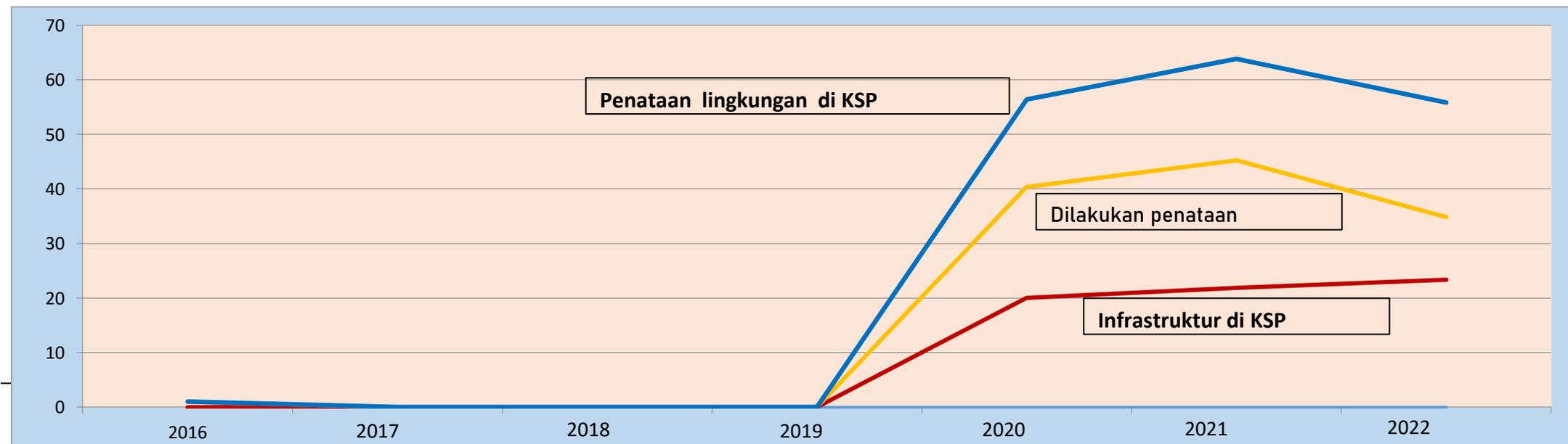


Tabel 3.7

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Program Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan Gedung dan penataan Bangunan dan Lingkungannya

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun berjalan 2022	Realisasi tahun ke- (-t)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase penanganan infrastruktur di KSP	23,31 %	-	-	-	-	20,0 %	21,89 %
2.	Persentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan	11,48 %	-	-	-	-	20,36 %	23,33 %
3.	Persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP	21,0 %	-	-	-	-	16,0 %	18,57 %



### 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Evaluasi kinerja melalui analisa pencapaian indikator kinerja bertujuan mengetahui perbandingan antara target Renstra dan realisasi, serta kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian misi; dinilai dan dipelajari untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Tabel 3.8

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Renstra 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra 2026
			Target Renstra	Realisasi	Capaian %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	40 %	44,08 %	41,15 %	93,35 %	57,00 %
2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	15,38 %	15,38 %	0 %	0,00 %	30,53 %
3.	Rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional	0 %	16,67 %	12,83 %	76,96 %	20,47 %
4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	0,06 %	0,078 %	0 %	0,00 %	0,00 %
5.	Persentase Luas daerah genangan yang tertangani	3,71 %	3,89 %	3,58 %	92,03 %	4,61 %
6.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi)	0,37 %	3,55 %	3,10 %	87,32 %	8,31 %
7.	Persentase penanganan infrastruktur di KSP	20 %	21,89 %	23,31 %	106,49 %	41,70 %
8.	Persentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan	20,36 %	23,33 %	11,48 %	49,21 %	46,67 %
9.	Persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP	16 %	18,57 %	21 %	113,09 %	32,86 %
10.	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	33,19 %	34,20 %	28,50 %	83,33 %	36,76 %
11.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	15 %	17,10 %	6,70 %	39,18 %	42,35 %
12.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi	10 %	12,28 %	12,6 %	102,61	17,44 %
13.	Presentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi	1,81 %	3,66 %	3,40 %	92,90 %	8,99 %

### **3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Sasaran strategis Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan dokumen Renstra Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 adalah meningkatnya pengelolaan air minum, meningkatnya pengelolaan air limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas, meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman serta meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) air baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir dan abrasi pantai. Indeks dan persentase yang dimaksud dipengaruhi oleh 8 (delapan) indikator program dari program Keciptakaryaan dan program sumber daya air.

Keciptakaryaan memiliki kewenangan melaksanakan infrastruktur pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program penataan bangunan dan lingkungannya serta penataan bangunan gedung

Berdasarkan jenis pelayanan keciptakaryaan yang dilakukan terdapat beberapa tantangan yang antara lain :

- a. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses air minum layak
- b. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses sanitasi layak dan aman
- c. Adanya peningkatan jumlah layanan rumah tangga terhadap akses pengelolaan persampahan
- d. Masih adanya potensi peningkatan genangan dikawasan permukiman

Sedangkan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Keciptakaryaan di Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Adanya program dari instansi terkait melibatkan semua Pemerintah daerah Kabupaten/kota, lembaga, kelompok masyarakat yang ada untuk saling berkoordinasi.
2. Masih kurangnya layanan akses air minum layak.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya akses sanitasi layak dan aman.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya akses pengelolaan persampahan.

5. Masih banyak kawasan genangan dipermukiman yang belum tertangani.
6. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dengan program DAK dan program strategis lainnya.

Luas Fungsional Daerah Irigasi kewenangan Provinsi berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria

dan Penetapan Status Daerah Irigasi seluas 47.640 Ha yang tersebar di 30 Daerah Irigasi (DI). Dari 30 Daerah irigasi tersebut, 13 diantaranya memerlukan penanganan rehabilitasi bendung yang usianya sudah lebih dari 30 tahun.

Berdasarkan dokumen pola pengelolaan wilayah sungai bahwa dari 5778,80 km panjang sungai kewenangan provinsi terdapat 577,880 km yang kritis dan sampai dengan tahun 2020 baru 84,075 km tertangani atau baru 14,55%. Panjang pantai kewenangan provinsi sepanjang 4.013 km, 1.450 km diantaranya rawan abrasi. Sampai dengan tahun 2020 baru 13,707 km yang telah ditangani atau 0,95% nya.

Namun demikian perubahan profil dan karakteristik sungai dan pantai yang mengancam permukiman dan obyek-obyek penting perlu diwaspadai karena kerusakan sungai maupun pantai bersifat progresif.

Berdasarkan jenis pelayanan yang dilakukan terdapat beberapa tantangan yang antara lain :

- a. Adanya pemanfaatan lahan yang belum sesuai dengan peruntukannya serta Meluasnya daerah rawan abrasi pantai.
- b. Intensitas bencana Alam dan tanah longsor sehingga mengganggu kondisi dan karakteristik alami sungai.

Sedangkan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sumber Daya Air Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Adanya program dari instansi terkait melibatkan semua lembaga, komisi, kelompok kerja yang ada untuk saling berkoordinasi.
2. Potensi pengembangan daerah irigasi Jaringan yang belum menjangkau daerah perbatasan dan terisolir.
3. Masih adanya Jaringan irigasi yang belum menjangkau daerah perbatasan dan terisolir.
4. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dengan program DAK dan IPDMIP.

Tersedianya lahan yang cukup bagi pengembangan sinergitas antar sektor.

Faktor peningkatan keberhasilan serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu, sebagai berikut :

**I. Meningkatkan penyediaan pengaman pantai, bendungan, Irigasi dan penyediaan air baku.**

1. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengamanan pantai
2. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bendungan dan sejenisnya
3. Pengelolaan penyediaan air baku
4. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder
5. Mengoptimalkan Koordinasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa

**II. Meningkatkan system penyediaan air minum (SPAM) lintas Kabupaten/Kota.**

1. Peningkatan kapasitas SDM
2. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pelatihan, sosialisasi kepada Pemda Kab/Kota dan masyarakat
3. Penyusunan kebijakan dan strategi sistem penyediaan air minum
4. Pembangunan jaringan perpipaan baru dan pemeliharaan SPAM
5. Peningkatan jaringan SPAM
6. Perluasan jaringan SPAM
7. Memfasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM
8. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan Pengelolaan SPAM
9. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Penyediaan Air Minum

**III. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Air Limbah**

1. Peningkatan kapasitas SDM
2. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pelatihan, sosialisasi kepada Pemda Kab/Kota dan masyarakat
3. Penyusunan kebijakan dan strategi sistem pengelolaan air limbah
4. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
5. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/ Kota

**IV. Meningkatkan Penyediaan Drainase dan Sarana Pendukungnya**

1. Penyusunan Kebijakan Sistem drainase perkotaan
2. Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan drainase
3. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase

## V. Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan di Kawasan strategis

1. Pengembangan infrastruktur kawasan strategis daerah
2. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah

### 3.1.5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur keciptakaryaan dan sumber daya air dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan factor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Untuk keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Masalah dan Hambatan Program/Kegiatan**

No.	Masalah & Hambatan Program/Kegiatan				
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>				
<b>A</b>	<b>IRIGASI DAN RAWA</b>				
1	Belum optimalnya Kinerja Sistem Irigasi.	Kerusakan Jaringan Irigasi	Sarana dan prasarana Daerah irigasi kewenangan provinsi sebagian besar dalam kondisi rusak		
			Belum lengkapnya sistem jaringan irigasi dan akibat kejadian bencana alam.		
			Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai)		
			Penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi		
			Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia belum memadai, menyebabkan rendahnya Kinerja Operasi dan pemeliharaan (OP)		
			Kapasitas kinerja kelembagaan pengelola irigasi dan partisipasi masyarakat petani belum optimal		
	Pelaksanaan OP yang belum optimal	Kerusakan Jaringan Irigasi	Pengelolaan Aset dalam Pengembangan dan pengelolaan irigasi masih belum optimal		
			Alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi		
			pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi belum seluruhnya disosialisasikan dan diterapkan sesuai manual OP		
			Manual OP belum seluruhnya tersedia		
			Kurangnya kesiapan kelembagaan dan personil pelaksana Operasi dan Pemeliharaan (OP)		
			Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) belum sepenuhnya tersedia		
Keterpaduan Pengelolaan Irigasi belum Optimal	Kerusakan Jaringan Irigasi	Keterbatasan penganggaran kegiatan OP belum sesuai dengan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP)			
		Kurang optimalnya koordinasi antara instansi, antar pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten) dan pemilik kepentingan			
		Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jaringan irigasi masih rendah.			
		Kelembagaan pengelola irigasi belum Optimal			
		Ketidakpastian pendanaan yang berkelanjutan.			
		Akurasi dan pembaharuan Pengelolaan data dan informasi irigasi masih kurang			
<b>B</b>	<b>SUNGAI, PANTAI, AIR BAKU</b>				
	1	Sistim Informasi SDA belum maksimal	Belum optimalnya penyediaan data SDA yang akurat, benar, berkelanjutan, tepat waktu dan mudah diakses		
			Sebaran pos pos hidrologi di seluruh WS kewenangan provinsi belum sesuai dengan hasil rasionalisasi.		
			Peralatan Hidrologi kurang memadai.		
			Kurangnya pembiayaan pemeliharaan pos hidrologi		
			Meningkatnya intensitas penggunaan air, pencemaran air, banjir dan tanah longsor		
			Kurangnya pelaksanaan pelatihan atau OJT untuk para petugas hidrologi dan staf pengolah data SDA		
	2	Kerusakan tebing sungai dan abrasi pantai	Masih banyaknya sungai yang kondisinya kritis.	Pembaharuan dan kontinuitas Data SIH3 tidak terintegrasi & terpadu	
				Masih banyaknya Pantai yang kondisinya kritis.	Seringnya terjadi bencana alam dan kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai).
					Terjadinya bencana abrasi pantai.
			Beralih fungsi pemanfaatan sempadan pantai.		
			3	Banyaknya pemukiman yang rawan banjir akibat kerusakan sungai dan semakin menurun daya tampung sungai di Sulawesi tengah	- Penyebab Banjir akibat perubahan morfologi dan hidrodinamika sungai - Penyebab Banjir Akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian SDA
- Adanya eksploitasi hutan dan penambangan batuan yang menjadi penyebab Perubahan kondisi DAS					
- Kawasan kumuh pada garis sempadan sungai - Kerusakan bangunan pengendali air - Infrastruktur bangunan pengendalian banjir belum optimal -Terganggunya resapan air dikawasan hutan -Kurangnya pemberdayaan dan sinkronisasi pengelolaan SDA di Wilayah Sungai Kewenangan Prov. Sulteng					

4	Masih banyaknya daerah yang belum mendapatkan akses air baku	- Terbatasnya sumber air Baku yang bisa dikelola	- Minimnya Infrastruktur Air Baku yang terbangun. - Kurang Optimalnya pengelolaan Infrastruktur Air Baku yang sudah terbangun.
		- Sumber daya air kurang dikelola dengan baik	Terdapat banyak kebocoran air di DAS akibat kurangnya perawatan dan pencurian air dilakukan oleh sebagian masyarakat yang belum memahami pentingnya air baku dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam rangka menjaga sumber air baku.
5	Masih banyaknya daerah yang belum mendapatkan air baku di Sulawesi Tengah	- Kendala sumber air baku berasal dari sungai - Sumber daya air kurang dikelola dengan baik	Tenaga atau SDM yang tersedia belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan
<b>2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			
<b>A SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			
1	Masih kurangnya Regulasi Daerah dalam mendukung NSPK Bidang Air Minum	Belum terarahnya Penyelenggaraan SPAM di Provinsi dan Kab/Kota.	Belum tersusunnya Perda tentang Penyelenggaraan SPAM di Provinsi Sulawesi Tengah dan Belum tersusunnya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Provinsi.
		Belum optimalnya pemenuhan SPM bidang Air Minum di Kawasan Lintas Kab/Kota	Belum tersusunnya Dokumen Perencanaan RISPAM Lintas Kab/Kota
2	Masih tingginya angka prefelensi penyakit (sistomiasis, Stunting)	Belum optimalnya infrastruktur SPAM	-Keterbatasan wilayah kewenangan provinsi hanya di pemenuhan kebutuhan air minum di kawasan Lintas Kab/Kota. -Kurangnya porsi penganggaran pembangunan infrastruktur SPAM. -Belum tersedianya dokumen perencanaan SPAM.
3	belum terkelola dan terpeliharanya Infrastruktur SPAM yang telah dibangun diluar wilayah kewenangan Provinsi  Infrastruktur SPAM yang telah dibangun belum dimanfaatkan dengan baik	Sebagian Infrastruktur SPAM yang dibangun berada diluar wilayah kewenangan Provinsi	- Perubahan regulasi setelah infrastruktur SPAM terbangun, sehingga tidak memiliki dasar hukum dalam pengusulan penganggaran untuk pengelolaannya.  -Kurangnya pemahaman stakeholder terkait kewenangan penyelenggaraan SPAM Provinsi, -Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengelola dan memelihara SPAM terbangun dan -Kurang / tidak adanya kelompok masyarakat pengelola SPAM terbangun.
		Belum dilakukan serah terima aset ke pemerintah daerah Kab/Kota	Penyerahan aset belum mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi (OPD)
4	Masih kurangnya pemenuhan penerapan SPM Bidang Air Minum di Kab/Kota	Pemenuhan Air Minum belum menjadi prioritas utama dalam pemenuhan SPM kepada masyarakat	Stakeholder (Pemerintah daerah) belum memahami tugas wajib dalam rangka pemenuhan SPM untuk masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan provinsi dalam mengawal pemenuhan penerapan SPM di Kab/Kota	Belum adanya data base tentang akses air minum ditingkat Provinsi dan Kab/Kota, serta Alokasi anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan penerapan SPM relatif rendah
5	Terbatasnya Sumber air baku permukaan untuk Air minum	Sumber air baku permukaan untuk air minum perkotaan mengalami pencemaran	Manajemen limbah domestik, industri dan pertanian belum optimal
		Keterbatasan Sumber air baku permukaan untuk air minum di perdesaan	- tidak memiliki Sumber Air Baku - terjadi kerusakan DAS
6	Belum optimalnya Kinerja SPAM	Masih terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia	Kurangnya peningkatan kapasitas pengetahuan SDM untuk memperbaharui pemahaman informasi terkait peraturan dan perundang-undangan terbaru tentang konstruksi dan bangunan gedung negara
7	Belum optimalnya Kinerja SPAM PASIGALA	Belum beroperasinya SPAM Pasigala sejak terjadinya Bencana Alam Gempa Bumi 28 September 2018	Belum selesainya proses kajian dan perencanaan perbaikan SPAM Regional PASIGALA
			Belum tersedianya anggaran untuk pengadaan lahan Belum adanya Nota Kesepakatan yang baru
			Kurangnya ketersediaan anggaran untuk biaya Operasional dan Pemeliharaan SPAM yang beroperasi mengalami penurunan fungsi akibat kurangnya kapasitas pengelola

<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		
<b>A</b>	<b>AIR LIMBAH (SANITASI)</b>		
<b>1</b>	<b>Masih tingginya angka penyakit yang disebabkan sanitasi buruk</b>	Rendahnya akses dan kualitas pengelolaan sanitasi (air limbah) layak dan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Provinsi tentang Sistem Pengelolaan Sanitasi.</li> <li>- Belum tersedianya dokumen perencanaan Teknis Sistem Pengelolaan Sanitasi pada Provinsi Sulawesi Tengah.</li> <li>- Kelembagaan yang belum efektif dan efisien pada pengelolaan sanitasi.</li> <li>- Lemahnya Pengawasan NSPK Sistem Pengelolaan Sanitasi.</li> <li>- Kurangnya kegiatan Pendampingan dan sosialisasi pengelolaan sanitasi kepada masyarakat.</li> <li>- Terbatasnya wilayah kewenangan provinsi (Regional) dalam menangani sektor sanitasi.</li> <li>- belum adanya komitmen pemerintah provinsi dengan pemerintah kab/kota dalam hal kerja sama penanganan sanitasi (Regional).</li> </ul>
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>		
<b>A</b>	<b>Persampahan</b>		
	<b>Masih tingginya timbulan sampah domestik yang belum tertangani</b>	Masih rendahnya layanan dan kualitas pengelolaan sampah domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Provinsi tentang Sistem Pengelolaan persampahan yang belum tersedia.</li> <li>- Dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan Kewenangan Provinsi belum tersedia</li> <li>- Lemahnya Pengawasan NSPK Sistem Pengelolaan persampahan</li> <li>- Kelembagaan belum efektif dan efisien.</li> <li>- Terbatasnya pendanaan pembangunan infrastruktur pengelolaan persampahan.</li> <li>- Kurangnya kegiatan sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat.</li> <li>- Belum adanya kesepakatan Wilayah kewenangan Provinsi (Regional) dalam menangani sektor persampahan.</li> </ul>
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		
<b>A</b>	<b>Drainase</b>		
	<b>Masih tingginya potensi genangan di kawasan permukiman</b>	Belum optimalnya infrastruktur sistem drainase permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terdapatnya Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Provinsi tentang Sistem Pengelolaan Drainase</li> <li>- Belum terdapatnya dokumen perencanaan sistem drainase permukiman sesuai kewenangan</li> <li>- Pengawasan NSPK Sistem Pengelolaan Drainase yang masih lemah</li> <li>- Keterbatasan wilayah kewenangan provinsi dalam menangani sektor drainase.</li> </ul>
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		
<b>A</b>	<b>Bangunan Gedung</b>		
<b>1</b>	Perancangan, Pembangunan, Kajian dan pemeliharaan bangunan gedung negara belum tertib.	- Sebagian besar Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara belum sepenuhnya berpedoman pada NSPK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Provinsi</li> <li>- Kurangnya sosialisasi yang mendukung kegiatan penetapan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Provinsi</li> <li>- Kurangnya pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pengelola Teknis</li> </ul>
<b>3</b>	Bangunan Gedung Negara banyak yang tidak berfungsi  Tumpang tindihnya program penyelenggaraan kegiatan penataan lingkungan permukiman	- Banyak Bangunan negara yang rusak akibat bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi  Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan Penataan Lingkungan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DED Bangunan Gedung Negara belum mengikuti SNI kegunaan</li> <li>- terbatasnya pendanaan dalam rehab rekon bangunan gedung negara</li> <li>- Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman</li> </ul>
<b>4</b>	Kurang terpeliharanya bangunan Gedung Negara yang mempengaruhi kepentingan masyarakat baik milik pemerintah maupun BUMN/Yayasan	Belum adanya peraturan yang mengatur tentang Penetapan Bangunan Gedung Negara untuk keperluan Strategis Provinsi	keterbatasan anggaran untuk menyusun Perda/Pergub bangunan Gedung Negara

<b>7</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		
<b>A</b>	<b>Perencanaan Bangunan Dan Lingkungannya</b>		
1.	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Provinsi	<p>A. Masih terbatasnya pengelola teknis yang memiliki sertifikasi dalam membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung</p> <p>B. Kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengusulan anggaran penyelenggaraan Bangunan Gedung ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis</p> <p>C. Banyaknya Bangunan Gedung Negara yang terbengkalai dan tidak terawat, mengalami kerusakan akibat kondisi cuaca dan umur bangunan</p> <p>D. Belum adanya pemeliharaan/perawatan Bangunan Cagar Budaya</p>	<p>a. Diklat yang dilakukan oleh BPSDM Pusat masih terbatas dalam hal kuota</p> <p>b. Minimnya anggaran dalam penyelenggaraan Diklat Pengelola Teknis</p> <p>a. Kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Non teknis tidak melibatkan Pengelola Teknis dalam pengusulan Anggaran Biaya Pembangunan Bangunan Gedung</p> <p>a. Terbatasnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan pemeliharaan berkala</p> <p>b. Terbatasnya anggaran pemeliharaan berkala di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</p> <p>a. Belum adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus yang menangani Bangunan Cagar Budaya</p> <p>b. Terbatasnya anggaran pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya</p>
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>		
<b>A</b>	<b>Jalan Lingkungan</b>		
1	Tumpang tindihnya program penyelenggaraan kegiatan Penataan Jalan Lingkungan	Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan Penataan Jalan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	<p>- Data base infrastruktur jalan lingkungan beserta kelengkapannya belum tersedia.</p> <p>- Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terkait penyelenggaraan kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman</p>

### 3.2. Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

#### 3.2.1. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Keuangan

Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah mengharapkan bahwa LKJIP tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai alat pembanding pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang juga menjadi penilaian untuk perbaikan dan perubahan dalam peningkatan kinerja.

Penyerapan anggaran Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah **79,99%** dari pagu anggaran pada DPPA, sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp. 52.295.034.551,- (20,01%)** berdasarkan analisis efektifitas dan efisiensi keuangan.

- Analisis efektifitas dan efisiensi Keuangan
  - Analisis efektifitas
 

Penyerapan Anggaran :

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Penyerapan anggaran

RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja

PA : Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja
  - Analisis Efisiensi
 

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right)}{n} \times 100\%$$

#### Analisis Efektifitas

$$\text{Penyerapan Anggaran : } P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

RA = Akumulasi Realisasi Anggaran seluruh Dinas

$$= \text{Rp. } 209.094.809.700,-$$

PA = Akumulasi Pagu anggaran seluruh Dinas

$$= \text{Rp. } 261.389.844.251,-$$

$$\text{Sehingga Efektifitas : } P = \frac{209.094.809.700}{261.389.844.251} \times 100\% = 79,99\%.$$

#### 3.2.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2022 yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi Dinas Cipta Karya dan

Sumber Daya air Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Uraian ringkas alokasi anggaran TA 2022 Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**

**Alokasi Anggaran pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

<b>SUMBER DANA</b>	<b>DPA-awal (Rp.)</b>	<b>DPA-P (Rp.)</b>
(1)	(2)	(3)
<b>Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>190.532.832.667</b>	<b>261.389.844.251</b>
1. Dinas (Sekretariat & Bidang)	166.452.041.739	277.877.174.779
2. UPT SPAM	2.515.108.755	3.716.039.755
3. UPT PSDA Wilayah I	5.875.991.740	9.311.275.330
4. UPT PSDA Wilayah II	15.689.690.433	20.485.354.387
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>16.074.328.852</b>	<b>16.074.328.852</b>
dana LOAN AIF No. 11DDKS1A dan LOAN ADB 1Z83YQPA Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)	1.348.912.984	-
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>207.956.074.503</b>	<b>277.464.173.103</b>

Adapun rincian pagu dan Realisasi Keuangan Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah TA 2022 digambarkan sebagai berikut :

Pagu Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan DPA awal Rp. 190.532.832.667,- dan APBD-Perubahan menjadi sebesar Rp. 261.389.844.251 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 112.121.424.384,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 149.268.419.687,- Uraian ringkas pagu anggaran dan realisasi per jenis belanja disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.11****Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Per Jenis Belanja**

<b>Belanja</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>S i s a</b>	<b>(%) Realisasi</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Belanja Operasi</b>	<b>112.121.424.384</b>	<b>106.204.953.812</b>	<b>5.916.470.572</b>	<b>94,72 %</b>
<b>Belanja Modal</b>	<b>149.268.419.687</b>	<b>102.889.855.888</b>	<b>46.378.563.799</b>	<b>68,93 %</b>
<b>Total (BTL+BL)</b>	<b>261.389.844.251</b>	<b>209.094.809.700</b>	<b>53.295.034.551</b>	<b>79,99 %</b>

Realisasi anggaran tahun 2022 sesuai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersedia pada **tabel**, sebagai berikut :

# DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

## PROVINSI SULAWESI TENGAH

### REALISASI PROGRAM KEGIATAN APBD SAMPAI DENGAN TW IV TA. 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH ANGGARAN	Jenis Belanja	SUMBER DANA	REALISASI			Sisa Pagu (Rp)	KETERANGAN
						30 Desember 2022				
						Keuangan		Fisik		
	Rp	(%)	(%)							
	<b>DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR</b>									
	<b>TOTAL</b>		261.389.844.251			209.094.809.700	79,99	82,55	52.295.034.551	
	SEKRETARIAT		30.144.848.175		-	28.440.250.386	94,35	99,95	1.704.597.789	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		30.144.848.175		-	28.440.250.386	94,35	99,95	1.704.597.789	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		680.100.450		-	632.078.027	92,94	99,05	48.022.423	
	Sub Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		379.101.050		-	350.511.194	92,46	98,30	28.589.856	
	Sub Keg. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		108.945.000			96.245.000	88,34	100,00	12.700.000	
	Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		159.848.750			154.171.600	96,45	100,00	5.677.150	
	Sub Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		32.205.650			31.150.233	96,72	100,00	1.055.417	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.853.789.047			2.688.188.021	94,20	99,89	165.601.026	
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		125.402.741			124.377.840	99,18	100,00	1.024.901	
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.423.334.481			2.267.038.905	93,55	99,86	156.295.576	
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		49.995.000			49.994.526	100,00	100,00	474	
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		78.850.000			70.570.000	89,50	100,00	8.280.000	
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		176.206.825			176.206.750	100,00	100,00	75	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.861.147.404			1.775.895.335	95,42	100,00	85.252.069	
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		922.703.000			902.490.696	97,81	100,00	20.212.304	
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		938.444.404			873.404.639	93,07	100,00	65.039.765	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH ANGGARAN	Belanja	SUMBER DANA	REALISASI		Sisa Pagu (Rp)	KETERANGAN	
						30 Desember 2022				
						Keuangan	Fisik			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		793.030.325			780.294.358	98,39	100,00	323.233	
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		487.896.800			476.546.833	97,67	100,00	323.233	
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		305.133.525			303.747.525	99,55	100,00	323.233	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.318.395.902			20.940.856.834	93,83	99,98	323.233	
	Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		21.759.541.902			20.393.515.152	93,72	99,98	323.233	
	Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		558.854.000			547.341.682	97,94	100,00	323.233	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		361.433.000			357.700.517	98,97	100,00	323.233	
	Sub Keg : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		174.000.000			170.590.750	98,04	100,00	323.233	
	Sub Keg : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		187.433.000			187.109.767	99,83	100,00	323.233	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.276.952.047			1.265.237.294	99,08	100,00	11.714.753	
	Sub Keg : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		286.077.250			284.632.190	99,49	100,00	1.445.060	
	Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		166.323.692			165.334.289	99,41	100,00	989.403	
	Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		203.096.900			202.722.665	99,82	100,00	374.235	
	Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		48.656.950			48.647.904	99,98	100,00	9.046	
	Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		190.301.000			188.357.801	98,98	100,00	1.943.199	
	Sub Keg : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		382.496.255			375.542.445	98,18	100,00	6.953.810	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>		50.737.822.488			45.172.504.741	89,03	91,24	5.565.317.747	
	<b>BIDANG IRIGASI DAN RAWA</b>		29.903.141.309			25.166.118.226	84,16	85,14	4.737.023.083	
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		29.903.141.309			25.166.118.226	84,16	85,14	4.737.023.083	
	Sub.Keg : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		2.749.577.500			2.730.028.402	99,29	100,00	19.549.098	
	Sub Keg : Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		10.349.011.250			9.479.418.530	91,60	92,24	869.592.720	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH ANGGARAN	Belanja	SUMBER DANA	REALISASI			Sisa Pagu (Rp)	KETERANGAN
						30 Desember 2022				
						Keuangan		Fisik		
	Sub Keg : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan		934.590.000			808.083.875	86,46	100,00	126.506.125	
	Sub Keg : Rehabilitasi Bendung Irigasi		11.435.984.250			7.781.586.556	68,04	68,15	3.654.397.694	
	Sub Keg : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		3.579.395.309			3.549.721.467	99,17	100,00	29.673.842	
	Sub Keg : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		854.583.000			817.279.396	95,63	100,00	37.303.604	
	<b>BIDANG SUNGAI DAN PANTAI</b>		20.834.681.179			20.006.386.515	96,02	99,98	828.294.664	
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		20.834.681.179			20.006.386.515	96,02	99,98	828.294.664	
	Sub Kegiatan PEMBANGUNAN UNIT AIR BAKU		130.512.500			127.952.500	98,04	100,00	2.560.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai		3.094.660.000	BO		3.093.506.000	99,96	100,00	1.154.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		9.839.505.090			9.299.470.100	94,51	100,00	540.034.990	
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai		6.864.779.850			6.600.464.850	96,15	99,94	264.315.000	
	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		473.329.814			463.455.270	97,91	100,00	9.874.544	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi		431.893.925			421.537.795	97,60	100,00	10.356.130	
	<b>BIDANG AIR MINUM</b>		24.573.547.275			23.368.840.006	95,10	100,00	1.204.707.269	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		14.251.450.275			13.097.993.870	91,91	100,00	1.153.456.405	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		14.251.450.275			13.097.993.870	91,91	100,00	1.153.456.405	
	Keg : Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM		1.398.545.775			1.329.633.750	95,07	100,00	68.912.025	
	Keg : Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan		12.852.904.500			11.768.360.120	91,56	100,00	1.084.544.380	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		870.220.925			852.029.736	97,91	100,00	18.191.189	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		870.220.925			852.029.736	97,91	100,00	18.191.189	
	Sub Keg : Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik		214.965.250			207.968.931	96,75	100,00	6.996.319	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		62.940.200			62.694.300	99,61	100,00	245.900	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH ANGGARAN	Belanja	SUMBER DANA	REALISASI			Sisa Pagu (Rp)	KETERANGAN
						30 Desember 2022				
						Keuangan		Fisik		
	Sub Keg : Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat		592.315.475			581.366.505	98,15	100,00	10.948.970	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		9.451.876.075			9.418.816.400	99,65	100,00	33.059.675	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		9.451.876.075			9.418.816.400	99,65	100,00	33.059.675	
	Sub Keg : Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan		9.070.016.150			9.039.656.750	99,67	100,00	30.359.400	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		123.210.000			122.328.100	99,28	100,00	881.900	
	Sub Keg : Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		150.000.000			149.129.925	99,42	100,00	870.075	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		108.649.925			107.701.625	99,13	100,00	948.300	
	<b>BIDANG PLBG</b>		122.420.956.841			79.199.631.842	64,69	66,48	43.221.324.999	
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		64.025.301.986			22.005.141.106	34,37	36,25	42.020.160.880	
	Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		64.025.301.986			22.005.141.106	34,37	36,25	42.020.160.880	
	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		42.624.045.360			1.764.801.607	4,14	4,26	40.859.243.753	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		19.913.582.027			18.801.450.803	94,42	99,97	1.112.131.224	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		1.487.674.599			1.438.888.696	96,72	100,00	48.785.903	
	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		5.174.522.535			4.620.875.975	89,30	99,54	553.646.560	
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5.174.522.535			4.620.875.975	89,30	99,54	553.646.560	
	Sub Keg : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		328.364.385			297.529.700	90,61	100,00	30.834.685	
	Sub Keg : Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		160.752.075			140.072.680	87,14	100,00	20.679.395	
	Sub Keg : Penataan Bangunan dan Lingkungan		4.192.808.200			3.875.069.815	92,42	100,00	317.738.385	
	Sub Keg : Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota		228.027.850			148.997.230	65,34	89,65	79.030.620	
	Sub Keg : Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		264.570.025			159.206.550	60,18	100,00	105.363.475	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH ANGGARAN	Belanja	SUMBER DANA	REALISASI			Sisa Pagu (Rp)	KETERANGAN
						30 Desember 2022				
						Keuangan		Fisik		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		53.221.132.320			52.573.614.761	98,78	99,62	647.517.559	
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		53.221.132.320			52.573.614.761	98,78	99,62	647.517.559	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		53.221.132.320			52.573.614.761	98,78	99,62	647.517.559	
	UPT I		9.311.275.330			9.101.507.583	97,75	98,72	209.767.747	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.836.197.705			2.750.854.903	96,99	100,00	85.342.802	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		25.337.825			25.251.329	99,66	100,00	86.496	
	Sub Keg : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		22.842.750			22.756.254	99,62	100,00	86.496	
	Sub Keg : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2.495.075			2.495.075	100,00	100,00	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		233.790.000			157.475.002	67,36	100,00	76.314.998	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		223.340.000			147.025.002	65,83	100,00	76.314.998	
	Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.450.000			10.450.000	100,00	100,00	-	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99.974.782			99.805.700	99,83	100,00	169.082	
	Sub Keg : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		99.974.782			99.805.700	99,83	100,00	169.082	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.477.095.098			2.468.322.872	99,65	100,00	8.772.226	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.449.089.000			2.441.233.760	99,68	100,00	7.855.240	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		28.006.098			27.089.112	96,73	100,00	916.986	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		6.475.077.625			6.350.652.680	98,08	98,15	124.424.945	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		798.962.750			797.246.485	99,79	100,00	1.716.265	
	Sub Keg : Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi		798.962.750			797.246.485	99,79	100,00	1.716.265	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5.676.114.875			5.553.406.195	97,84	97,89	122.708.680	
	Sub Keg : Operasional Unit Pengelola Irigasi		472.124.875			471.702.385	99,91	100,00	422.490	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH ANGGARAN	Belanja	SUMBER DANA	REALISASI		Sisa Pagu (Rp)	KETERANGAN	
						30 Desember 2022				
						Keuangan	Fisik			
	Sub Keg : Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		555.910.000			535.656.730	96,36	96,49	20.253.270	
	Sub Keg : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		4.432.470.000			4.330.437.080	97,70	97,74	102.032.920	
	Sub Keg : Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		215.610.000			215.610.000	100,00	100,00	-	
	UPT II		20.485.354.387			20.191.781.150	98,57	100,00	293.573.237	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		3.708.652.541			3.451.095.870	93,06	100,00	257.556.671	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		290.534.000			189.437.250	65,20	100,00	101.096.750	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		290.534.000			189.437.250	65,20	100,00	101.096.750	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		67.984.375			65.380.000	96,17	100,00	2.604.375	
	Sub Keg : Pengadaan Mebel		67.984.375			65.380.000	96,17	100,00	2.604.375	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.350.134.166			3.196.278.620	95,41	100,00	153.855.546	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		94.566.196			33.650.849	35,58	100,00	60.915.347	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.255.567.970			3.162.627.771	97,15	100,00	92.940.199	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		16.776.701.846			16.740.685.280	99,79	100,00	36.016.566	
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		6.640.557.023			6.623.020.760	99,74	100,00	17.536.263	
	Sub Keg : Normalisasi/Restorasi Wilayah Sungai Wilayah II		1.306.600.280			1.306.115.025	99,96	100,00	485.255	
	Sub Keg : Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		390.804.700			388.592.675	99,43	100,00	2.212.025	
	Sub Keg : Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		3.532.922.043			3.523.926.692	99,75	100,00	8.995.351	
	Sub Keg : Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS. Kewenangan Provinsi		1.410.230.000			1.404.386.368	99,59	100,00	5.843.632	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10.136.144.823			10.117.664.520	99,82	100,00	18.480.303	
	Sub Keg : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		8.929.631.778			8.921.373.000	99,91	100,00	8.258.778	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH ANGGARAN	Belanja	SUMBER DANA	REALISASI		Sisa Pagu (Rp)	KETERANGAN	
						30 Desember 2022				
						Keuangan	Fisik			
	Sub Keg : Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		665.370.570			664.853.000	99,92	100,00	517.570	
	Keg : Operasional Unit Pengelola Irigasi		79.799.475			79.540.770	99,68	100,00	258.705	
	Keg : Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		461.343.000			451.897.750	97,95	100,00	9.445.250	
	UPT SPAM		3.716.039.755			3.620.293.992	97,42	100,00	95.745.763	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.308.275.705			1.239.178.622	94,72	100,00	69.097.083	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		155.066.255			149.728.740	96,56	100,00	5.337.515	
	Sub Keg : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor		13.882.070			13.854.521	99,80	100,00	27.549	
	Sub Keg : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		34.117.425			33.234.614	97,41	100,00	882.811	
	Sub Keg : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.481.010			2.481.010	100,00	100,00	-	
	Sub Keg : Penyediaan Bahan Logistik Kantor		60.540.000			59.700.000	98,61	100,00	840.000	
	Sub Keg : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22.538.750			19.707.595	87,44	100,00	2.831.155	
	Sub Keg : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		21.507.000			20.751.000	96,48	100,00	756.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		40.070.000			31.031.390	77,44	100,00	9.038.610	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		30.000.000			21.176.390	70,59	100,00	8.823.610	
	Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		10.070.000			9.855.000	97,86	100,00	215.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.113.139.450			1.058.418.492	95,08	100,00	54.720.958	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.652.000			3.650.000	99,95	100,00	2.000	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		36.609.550			36.569.637	99,89	100,00	39.913	
	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.072.877.900			1.018.198.855	94,90	100,00	54.679.045	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH ANGGARAN	Belanja	SUMBER DANA	REALISASI		Sisa Pagu (Rp)	KETERANGAN	
						30 Desember 2022				
						Keuangan	Fisik			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		2.407.764.050	.		2.381.115.370	98,89	100,00	26.648.680	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		2.407.764.050	.		2.381.115.370	98,89	100,00	26.648.680	
	Sub Keg : Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan		1.776.458.975	.		1.765.154.328	99,36	100,00	11.304.647	
	Sub Keg :Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota		569.001.075	.		559.206.735	98,28	100,00	9.794.340	
	Sub Keg : Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota		62.304.000	.		56.754.307	91,09	100,00	5.549.693	

**Catatan :**

**Program : 14**

**kegiatan : 30**

**Sub Kegiatan : 91**

### 3.3. INOVASI

Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### 1. ELOKTRONIK BANTUAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA (E-BANTEK BGN)

Aplikasi e-bantekbgn ( Elektronik Bantuan Teknis Bangunan Gedung Negara) adalah Sistem yang di bangun oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air untuk memberikan informasi dan mendapatkan layanan Bantuan Teknis Bangunan Gedung Negara melalui pendaftaran pada aplikasi ebantekbgn. Dengan semangat Undang-Undang Bangunan Gedung (Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung), melalui e-BantekPBGN, pendaftaran Bantuan Teknis PBGN menjadi mudah, efektif, efisien dan menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

**Pemetaan Jejaring Kerja (Net Map)**

The diagram shows a central node labeled 'e-bantekbgn' with a description: 'Aplikasi e-bantekbgn ( Elektronik Bantuan Teknis Bangunan Gedung Negara) adalah Sistem yang di bangun oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air untuk memberikan informasi dan mendapatkan layanan Bantuan Teknis Bangunan Gedung Negara melalui pendaftaran pada aplikasi ebantekbgn. Dengan semangat Undang-Undang Bangunan Gedung (Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung), melalui e-BantekPBGN, pendaftaran Bantuan Teknis PBGN menjadi mudah, efektif, efisien dan menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Selengkapnya e-bantekbgn'.

The Net Map illustrates the workflow for technical assistance requests, starting from 'Hubungan informal' (Informal Relationship) to 'Hubungan formal' (Formal Relationship) through various stages of request submission and processing. The central node is 'e-bantekbgn' (Elektronik Bantuan Teknis Bangunan Gedung Negara). The workflow involves 'Hubungan informal' (Informal Relationship) leading to 'Hubungan formal' (Formal Relationship) through 'Surat Pengantar Pemeliharaan Teknik' (Technical Maintenance Request Letter) or 'Surat Pengantar Perbaikan Teknik' (Technical Repair Request Letter) submitted to 'Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air' (DCKS). The process includes 'Surat Masuk / Permohonan OPD' (Incoming Letter / OPD Request) and 'Surat Pengantar Pemeliharaan Teknik' (Technical Maintenance Request Letter) or 'Surat Pengantar Perbaikan Teknik' (Technical Repair Request Letter) submitted to 'Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air' (DCKS). The central node is 'e-bantekbgn' (Elektronik Bantuan Teknis Bangunan Gedung Negara). The workflow involves 'Hubungan informal' (Informal Relationship) leading to 'Hubungan formal' (Formal Relationship) through 'Surat Pengantar Pemeliharaan Teknik' (Technical Maintenance Request Letter) or 'Surat Pengantar Perbaikan Teknik' (Technical Repair Request Letter) submitted to 'Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air' (DCKS). The process includes 'Surat Masuk / Permohonan OPD' (Incoming Letter / OPD Request) and 'Surat Pengantar Pemeliharaan Teknik' (Technical Maintenance Request Letter) or 'Surat Pengantar Perbaikan Teknik' (Technical Repair Request Letter) submitted to 'Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air' (DCKS).

## 2. PENGELOAAN SISTEM INFORMASI DATA SUMBER DAYA AIR (SISDA) UPT PSDA WILAYAH II

Penyajian data secara terpusat dalam bentuk digital diperlukan untuk memudahkan pengelolaan data oleh pimpinan/admin dalam mengaksesnya kapan saja dan dimana saja, untuk itu UPT PSDA Wilayah II Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Cikasda) Prov. Sulawesi Tengah telah membuat Akun digital sebagai wadah pengelolaan data secara elektronik. Dalam akun digital UPT PSDA Wilayah II ini mengelola data Hidrologi dan SIM, OP. Daerah Irigasi, Data Sub. Bagian Tata Usaha dan Data yang dikirimkan dari lapangan melalui Form digital. Akun digital tersebut di akses dengan 2(dua) cara:

- 1) Login Akun (Pimpinan/Admin); digunakan untuk pengelolaan data
- 2) Link yang telah di sematkan pada website Dinas Cikasda; digunakan untuk mengakses data:
  - Hidrologi dan SIM (3 Wilayah Sungai)
  - Daerah Irigasi (15 Daerah Irigasi)



### 3.4. PENGHARGAAN

Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya air Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan Kedudukan terbaik Provinsi III Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi dalam rangka lomba dan penilaian kinerja pengelola sumber daya air wilayah sungai tingkat nasional, evaluasi kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber daya Air wilayah sungai tingkat nasional, kinerja petugas operasi dan pemeliharaan irigasi teladan nasional, penguatan kelembagaan atau pemilihan unit pengelola bendungan dan petugas pemantauan bendungan serta penguatan kelembagaan atau pemilihan komunitas peduli sungai tingkat nasional tahun 2022 pada Peringatan Hari Bakti PU ke-77 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Jakarta tanggal 03 Desember 2022.

Wilayah Sungai (WS) Lambunu Buol Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu dari empat WS kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tahun ini diikutkan dalam lomba evaluasi kinerja Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Nasional kategori WS Provinsi.

Sekretariat TKPSDA WS Lambunu Buol yang berada di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Prov. Sulawesi dan dalam tugasnya menyiapkan dan mendukung kinerja TKPSDA WS Lambunu Buol telah bekerja cukup maksimal dgn ketersediaan dana yang relatif minim. Namun dengan semangat semua anggota TKPSDA dan tim sekretariat, akhirnya membuahkan hasil yang cukup membanggakan sebagai peraih penghargaan terbaik ketiga tingkat Nasional.

Piagam penghargaan TKPSDA WS Lambunu Buol sebagai Terbaik III Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi terlampir.



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEMBERIKAN

**PENGHARGAAN**

KEPADA:

**TKPSDA WS LAMBUNU BUOL**

SEBAGAI

**TERBAIK III**

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI  
PADA PERINGATAN HARI BAKTI PU KE-77**

Jakarta, 3 Desember 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Penyusunan LKJiP ini merupakan amanat yang tertuang dalam **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua pihak.

LKJiP Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana IPDMIP yang tercantum pada DPA Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah total nilai sebesar **Rp. 261.389.844.251,-** realisasi anggaran mencapai **Rp. 209.094.809.700,-** atau serapan dana mencapai 79,99%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) sebesar **Rp.52.293.034.551,-**.

Secara efektif anggaran tersebut telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah selama satu tahun.

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI KEGIATAN 2022**

**DINAS CIPTA KARYA DAN**

**SUMBER DAYA AIR**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 2022**

**AMPLP**

**DOKUMENTASI PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM  
DESA TOLIBA KECAMATAN TOJO BARAT KABUPATEN  
TOJO UNA-UNA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



KONDISI  
0%



KONDISI  
50%



KONDISI  
75%



KONDISI  
100%

**DOKUMENTASI PEMBANGUNAN SPAM DESA KAMBANI KECAMATAN  
BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2022**

KONDISI  
0%



KONDISI  
50%



KONDISI  
75%



KONDISI  
100%

**DOKUMENTASI PEKERJAAN BANTUAN AIR BERSIH DESA BANGGA  
KECAMATAN DOLO BARAT KABUPATEN SIGI 2022**

KONDISI  
0%



KONDISI  
50%



KONDISI  
75%



KONDISI  
100%

**DOKUMENTASI PEKERJAAN PENINGKATAN SPAM  
DESA OLOBOJU KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI  
TAHUN ANGGARAN 2022**



KONDISI  
0%



KONDISI  
50%



KONDISI  
75%



KONDISI  
100%

**DOKUMENTASI DUSUN LAPALOANG KELURAHAN GANTI  
KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA 2022**



KONDISI  
0%



KONDISI  
50%



KONDISI  
75%



KONDISI  
100%

**DOKUMENTASI PENINGKATAN SPAM DESA TONDO KECAMATAN  
SIRENJA KABUPATEN DONGGALA 2022**



KONDISI  
0%



KONDISI  
50%



KONDISI  
75%



KONDISI  
100%

## DOKUMENTASI PELAKSANAAN

**PEKERJAAN** : **PEMBANGUNAN DRAINASE DESA MEKAR KENCANA, KEC. TOILI, KAB. BANGGAI**  
**LOKASI** : **DESA MEKAR KENCANA KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI**  
**TAHUN** : **2022**

FOTO	KONDISI	KETERANGAN
	<b>0%</b>	<b>KONDISI EKSISTING</b>
	<b>50%</b>	<b>PELAKSANAAN PEKERJAAN GALIAN TANAH</b>
	<b>100%</b>	<b>PELAKSANAAN PEKERJAAN FINISHING</b>

## DOKUMENTASI PELAKSANAAN

**PEKERJAAN** : PEMBANGUNAN MCK DESA MARANTALE KEC. SINIU KAB. PARIGI MOUTONG  
**LOKASI** : DESA MARANTALE KEC. SINIU KAB. PARIGI MOUTONG  
**TAHUN** : 2022

FOTO	KONDISI	KETERANGAN
	<b>0%</b>	Pekerjaan pasang Patok dan Penggalian oleh pelaksana
	<b>50%</b>	Pekerjaan pasang dinding Batako dan Kolom Beton
	<b>100%</b>	<b>PELAKSANAAN PEKERJAAN FINISHING</b>

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 2022**

**IRIGASI RAWA**



**SUB KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG IRIGASI  
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I KOLONDOM**



TAHUN 2022

**DOKUMENTASI PEKERJAAN**

**PERBAIKAN SAYAP  
BENDUNG KIRI**

0 %



**CV. KANDIDAT**  
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER  
Alamat : J. Persada Kiri, Sulawesi Kecamatan Bontol Kabupaten

**PERBAIKAN SAYAP  
BENDUNG KIRI**

50 %



**CV. KANDIDAT**  
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER  
Alamat : J. Persada Kiri, Sulawesi Kecamatan Bontol Kabupaten

**PERBAIKAN SAYAP  
BENDUNG KIRI**

100 %



**CV. KANDIDAT**  
GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER  
Alamat : J. Persada Kiri, Sulawesi Kecamatan Bontol Kabupaten



**SUB KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG IRIGASI  
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I KOLONDOM**



TAHUN 2022

**DOKUMENTASI PEKERJAAN**

**PERBAIKAN PINTU  
BENDUNG**

0 %



**PERBAIKAN PINTU  
BENDUNG**

50 %



**PERBAIKAN PINTU  
BENDUNG**

100 %



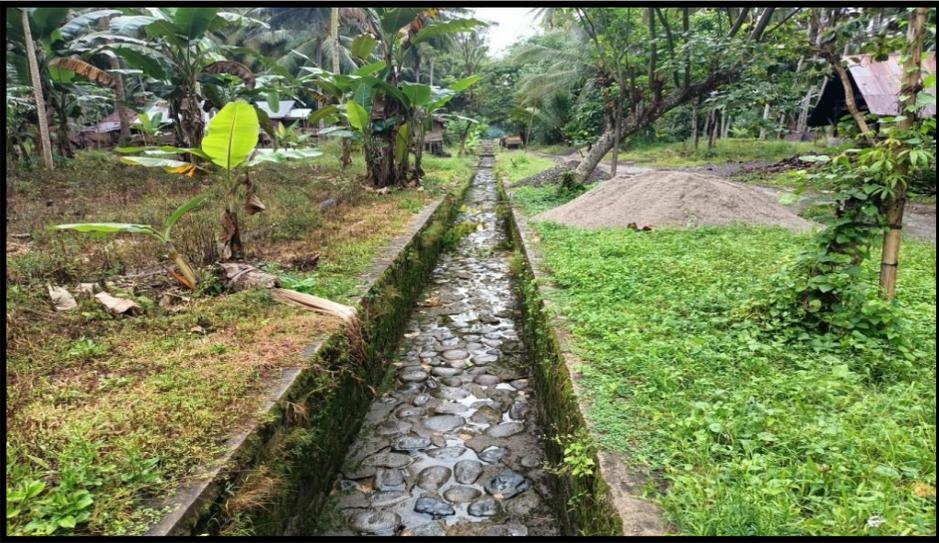


**SUB KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG IRIGASI  
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I KOLONDOM**



TAHUN 2022

**DOKUMENTASI PEKERJAAN**

<p><b>PERBAIKAN LANTAI SALURAN</b></p> <p>0 %</p> 	
<p><b>PERBAIKAN LANTAI SALURAN</b></p> <p>50 %</p> 	
<p><b>PERBAIKAN LANTAI SALURAN</b></p> <p>100 %</p> 	



**SUB KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG IRIGASI  
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I KOLONDOM**



TAHUN 2022

**DOKUMENTASI PEKERJAAN**

<p><b>PERBAIKAN BANGUNAN SILANG</b></p> <p>0 %</p> 		
<p><b>PERBAIKAN BANGUNAN SILANG</b></p> <p>50 %</p> 		
<p><b>PERBAIKAN BANGUNAN SILANG</b></p> <p>100 %</p> 		



**SUB KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG IRIGASI  
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I KOLONDOM**



TAHUN 2022

**DOKUMENTASI PEKERJAAN**

**TIMBUNAN TANAH  
DIDATANGKAN**

0 %



**TIMBUNAN TANAH  
DIDATANGKAN**

50 %



**TIMBUNAN TANAH  
DIDATANGKAN**

100 %





**SUB KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG IRIGASI  
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I KOLONDOM**



TAHUN 2022

**DOKUMENTASI PEKERJAAN**

<p><b>BANGUNAN TERJUN</b></p>		
<p>0 %</p>		
<p><b>BANGUNAN TERJUN</b></p>		
<p>50 %</p>		
<p><b>BANGUNAN TERJUN</b></p>		
<p>100 %</p>		



**SUB KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG IRIGASI  
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I KOLONDOM**



TAHUN 2022

**DOKUMENTASI PEKERJAAN**

<p><b>PROTEKSI SALURAN</b></p>	
<p>0 %</p>	
	
<p><b>PROTEKSI SALURAN</b></p>	
<p>50 %</p>	
	
<p><b>PROTEKSI SALURAN</b></p>	
<p>100 %</p>	
	



**SUB KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG IRIGASI  
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I KOLONDOM**



TAHUN 2022

**DOKUMENTASI PEKERJAAN**

<p><b>TYROLL BENDUNG</b></p>		
<p>0 %</p>		
<p><b>TYROLL BENDUNG</b></p>		
<p>50 %</p>		
<p><b>TYROLL BENDUNG</b></p>		
<p>100 %</p>		



**SUB KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG IRIGASI  
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I KOLONDOM**



TAHUN 2022

**DOKUMENTASI PEKERJAAN**

<p><b>PERBAIKAN BANGUNAN SILANG</b></p>		
<p>0 %</p>		
<p><b>PERBAIKAN BANGUNAN SILANG</b></p>		
<p>50 %</p>		
<p><b>PERBAIKAN BANGUNAN SILANG</b></p>		
<p>100 %</p>		

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 2022**

**PLBG**

**DOKUMENTASI**  
**Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Rapat Lt. 4 Gedung Kantor Dinas**  
**Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



0%



50%



100%



100%

**DOKUMENTASI**  
**Pengadaan Sekat Kaca Partisi Rumah Jabatan Wakil Gubernur**  
**Sulawesi Tengah**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



0%



50%



100%

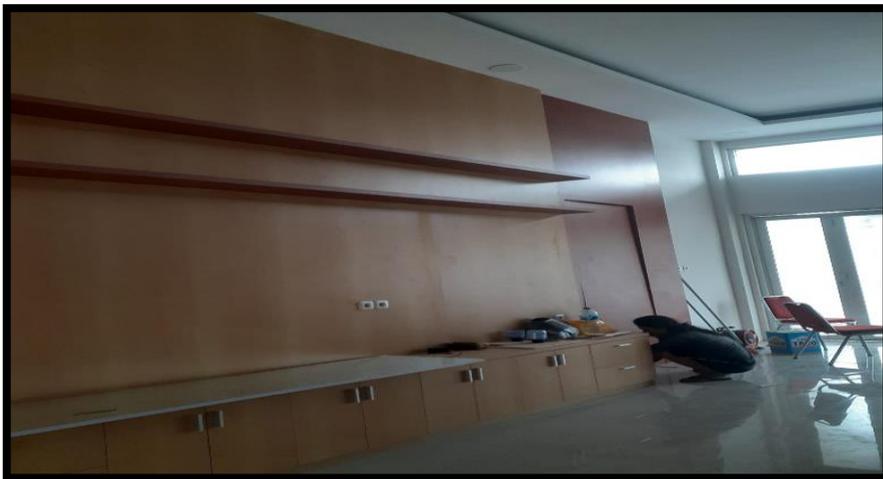


100%

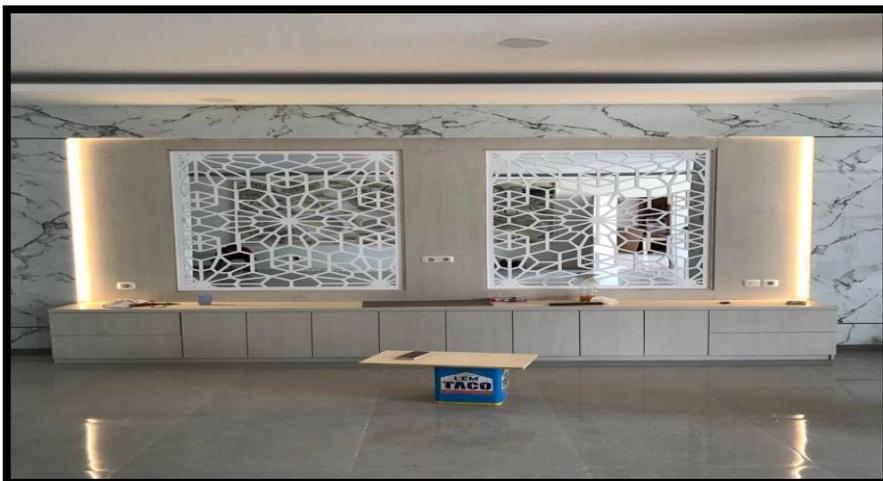
**DOKUMENTASI**  
**Pekerjaan Interior Paviliun Rumah Jabatan Wakil Gubernur**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



0%



50%



100%



100%

### DOKUMENTASI

## Pekerjaan Taman Kantor Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah TAHUN ANGGARAN 2022



0%



50%



100%



100%

### DOKUMENTASI

## Pekerjaan Pembangunan Pagar Samping Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah TAHUN ANGGARAN 2022



0%



50%



100%



100%

**DOKUMENTASI**  
**Pekerjaan Gazebo, Kolam, Aviari dan Fasilitas Pendukung**  
**Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



0%



50%



100%



100%

**DOKUMENTASI**  
**Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Lansekap**  
**Rumah Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**



0%



50%



100%



100%

# DOKUMENTASI

## Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Tavanjuka, Kota Palu

### TAHUN ANGGARAN 2022



0%



50%



100%



100%



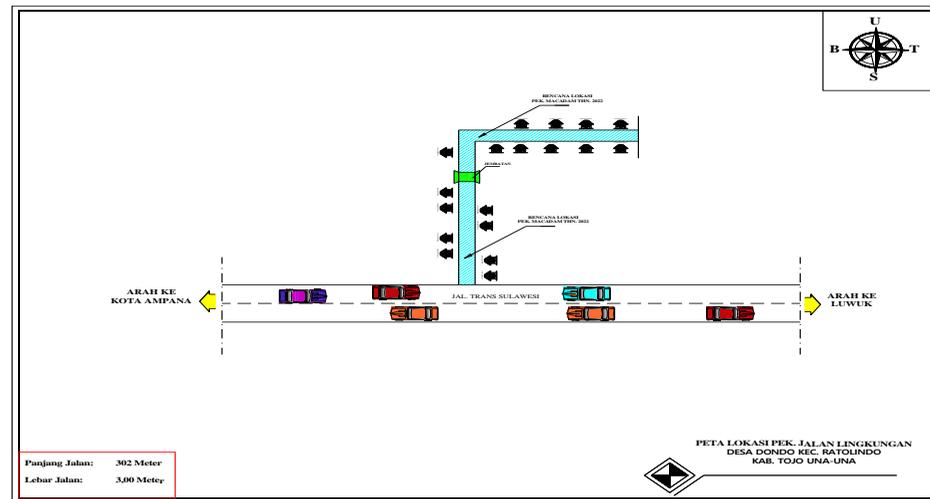
**DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. SURYA RAYA PERKASA**

**KEGIATAN** : PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR  
**JENIS PEKERJAAN** : JALAN LINGKUNGAN (LAPIS PENETRASI MACADAM)  
**LOKASI** : DESA DONDO KEC. RATOLINDO KAB. TOJO UNA-UNA  
**TAHUN ANGGARAN** : 2022

PEKERJAAN	NOMOR GAMBAR	SISI	KONDISI
AGREGAT 1/2	1	SISI 1	50%
	2	SISI 2	50%
	3	SISI 3	50%
	4	SISI 4	50%



50% SISI 1 1



50% SISI 2 2



50% SISI 3 3



50% SISI 4 4



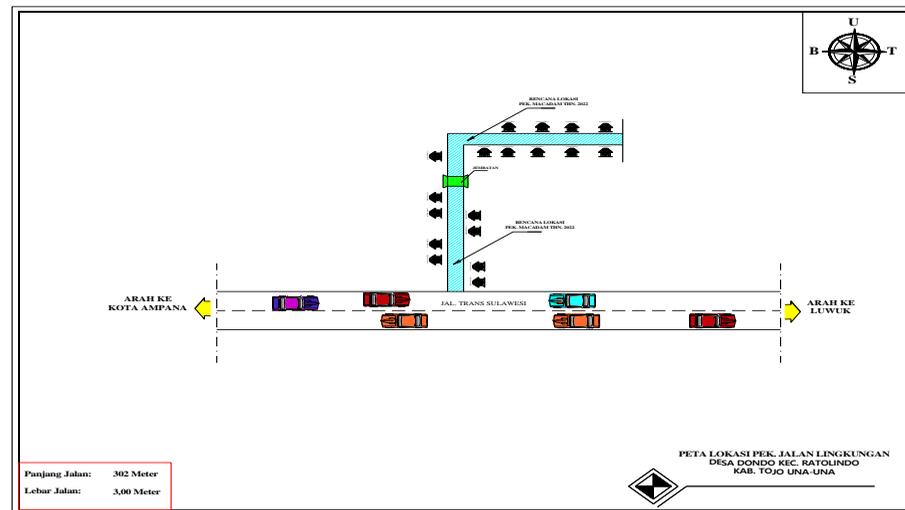
**DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KONTRAKTOR PELAKSANA**

**CV. SURYA RAYA PERKASA**

KEGIATAN : PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR  
 JENIS PEKERJAAN : JALAN LINGKUNGAN (LAPIS PENETRASI MACADAM)  
 LOKASI : DESA DONDO KEC. RATOLINDO KAB. TOJO UNA-UNA  
 TAHUN ANGGARAN : 2022

PEKERJAAN	NOMOR GAMBAR	SISI	KONDISI
SIRAMAN AGREGAT KASAR PENGUNCI (1/2)	1	SISI 1	75%
	2	SISI 2	75%
	3	SISI 3	75%
	4	SISI 4	75%



75% SISI 1 1



75% SISI 2 2



75% SISI 3 3



75% SISI 4 4

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 2022**

**SPDAB**

<p><b>DOKUMENTASI PEKERJAAN</b></p>		<p><b>LOKASI : PENGAMAN PANTAI DESA PONGIAN</b>  <b>KEC : BUNTA</b>  <b>KAB : BANGGAI</b></p>	
<p>0%</p>	<p>50%</p>		
<p>75%</p>	<p>100%</p>		

<p style="text-align: center;"><b>DOKUMENTASI PEKERJAAN</b></p>		<p>LOKASI</p>	<p>: PENGAMAN PANTAI DESA PONGIAN</p>
		<p>KEC</p>	<p>: BUNTA</p>
		<p>KAB</p>	<p>: BANGGAI</p>
<p>0%</p>	<p>50%</p>		
			
<p>75%</p>	<p>100%</p>		
			

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 2022**

**UPT I**

## DOKUMENTASI PEKERJAAN

### PEK. PENGECATAN KLIMATOLOGI KARYA MUKTI



0 %



50 %

100 %



**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 2022**

**UPT II**

## DOKUMENTASI PENGAMAN PANTAI DESA KOTA RAYA TAHUN ANGGARAN 2022



KONDISI  
0%



KONDISI  
50%

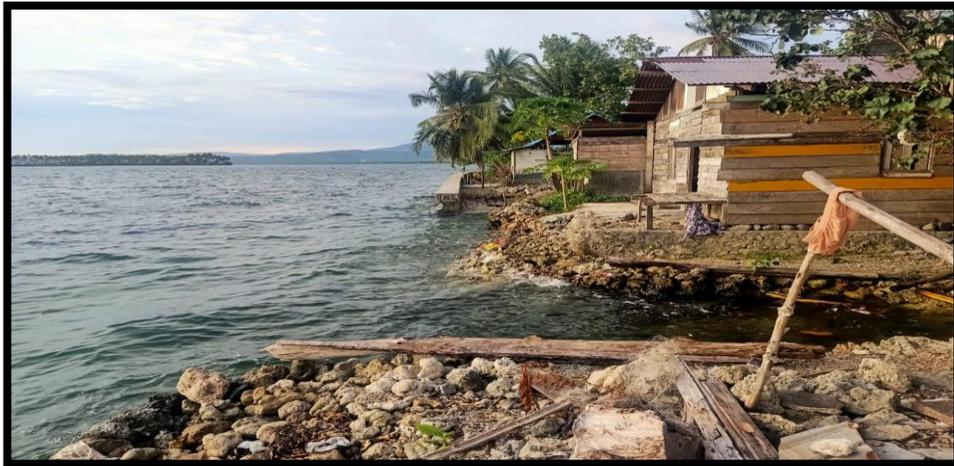


KONDISI  
75%



KONDISI  
100%

# DOKUMENTASI PENGAMAN PANTAI DESA KOTA RAYA TAHUN ANGGARAN 2022



0%



50%



100%



100%

**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN 2022**

**UPT SPAM**

**DOKUMENTASI PEMELIHARAAN JARINGAN SPAM LOKASI DESA  
TAMARENJA KABUPATEN DONGGALA 2022**

KONDISI  
0%



KONDISI  
50%



KONDISI  
75%



KONDISI  
100%